



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA JAMBI

Kota Jambi
Bahagia

PROFIL KOTA LAYAK ANAK KOTA JAMBI TAHUN 2025



Dpmpppa
KOTA JAMBI

PSDGA
PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK



KATA PENGANTAR

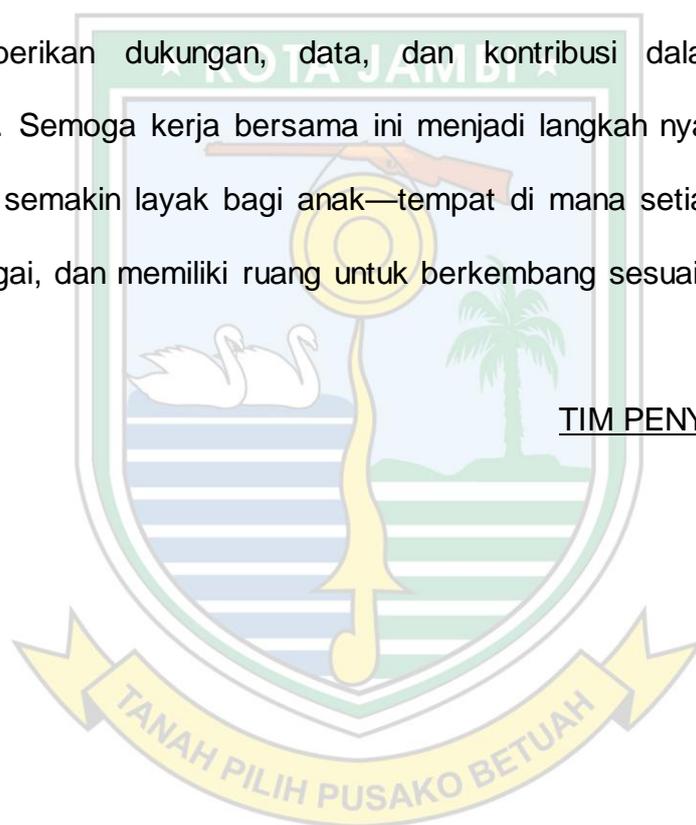
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Tim Penyusun berhasil menyelesaikan dokumen Profil Kota Layak Anak (KLA) Kota Jambi Tahun 2025 sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berpihak kepada anak.

Profil ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan program KLA di Kota Jambi, mulai dari kebijakan, capaian, inovasi, hingga praktik baik yang telah dilaksanakan di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan. Dokumen ini juga menjadi refleksi atas kerja kolaboratif lintas sektor—pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, media, organisasi masyarakat, serta anak-anak itu sendiri—dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Kota Jambi dengan diraihnya predikat tertinggi “Utama” dalam Anugerah KLA yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Capaian ini bukan hanya hasil dari kerja keras pemerintah, tetapi juga buah dari partisipasi aktif masyarakat dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjadikan anak sebagai subjek utama pembangunan.

Tim Penyusun menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki keterbatasan dan ruang untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan dan penguatan pelaksanaan KLA di masa mendatang. Semoga profil ini dapat menjadi referensi, inspirasi, dan bahan evaluasi bagi semua pihak yang peduli terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, data, dan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga kerja bersama ini menjadi langkah nyata menuju Kota Jambi yang semakin layak bagi anak—tempat di mana setiap anak merasa aman, dihargai, dan memiliki ruang untuk berkembang sesuai potensinya.



TIM PENYUSUN

SAMBUTAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA JAMBI

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Kota Jambi kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam pelaksanaan program Kota Layak Anak (KLA) tahun 2025. Predikat "Utama" yang diraih dalam Anugerah KLA Nasional bukan hanya menjadi simbol keberhasilan, tetapi juga bukti nyata bahwa komitmen dan kerja bersama seluruh elemen masyarakat telah menghasilkan perubahan positif bagi anak-anak di Kota Jambi.

Sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, saya merasa bangga dan terhormat dapat menyampaikan sambutan dalam dokumen profil ini. Profil KLA Kota Jambi Tahun 2025 disusun sebagai bentuk dokumentasi atas capaian, inovasi, dan praktik baik yang telah dilaksanakan sepanjang tahun, sekaligus menjadi refleksi atas tantangan dan peluang yang masih perlu kita jawab bersama.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, media, organisasi masyarakat, serta anak-anak itu sendiri. Di tingkat kelurahan dan kecamatan, penyelenggaraan KLA telah menunjukkan dinamika yang luar biasa—dengan lahirnya berbagai inovasi lokal seperti Posyandu Ramah Anak, Pojok Literasi, Kampung Bebas Kekerasan, dan Forum Anak yang aktif menyuarakan aspirasi mereka.

Kami menyadari bahwa mewujudkan Kota Layak Anak bukanlah tugas yang selesai dalam satu periode. Ini adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen, konsistensi, dan keberanian untuk terus berinovasi. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga semangat kolaborasi, memperkuat kapasitas, dan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi anak-anak dalam pembangunan daerah.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penyusun, mitra kerja, dan masyarakat Kota Jambi yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan KLA. Semoga dokumen ini menjadi inspirasi dan pijakan strategis untuk melangkah lebih jauh menuju Kota Jambi yang benar-benar layak bagi anak—tempat di mana setiap anak tumbuh dengan aman, sehat, cerdas, dan bahagia.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jambi, Agustus 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Jambi

Dra. Hj. Noverintiwi Dewanti, ME

Pembina Utama Muda

NIP. 19711125 199201 2 001

TIM PENYUSUN

Pengarah :

Dra. Hj. Noverintiwi Dewanti, ME
(Kepala Dinas PMPPA)

H. Hendy Sauki, S. Sos
(Sekretaris Dinas PMPPA)

Penanggung Jawab :

Hj. Rosdalia, SH, MH
(Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak)

Penulis Naskah :

Deki Kurniawan, S. Pt
(JFT Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda)

Editor :

M. Khoirul Rizal, S. Kom
(Pranata Komputer Ahli Pertama)

Kontributor Data

Irma Rosita, SE (JFT Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda)

Zahara, S. Pdi (JFT Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda)

Elvira Savitri (Arsiparis Terampil)

Bram Kurniawan, SE (Penata Layanan Operasional)

Andi Nugraha, SE (Penata Layanan Operasional)

Marino Sumarganda, S. Kom (Penata Layanan Operasional)

Sanggup Rehulina Sitanggang (Pengadministrasian Perkantoran)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
TIM PENYUSUN	5
DAFTAR ISI	6
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	3
C. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN UMUM	7
A. Letak Geografis.....	7
B. Visi Dan Misi Kota Jambi	12
BAB III KELEMBAGAAN	13
A. Peraturan Daerah	15
B. Penguatan Kelembagaan.....	18
C. Peran Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha Dan Media Masa	20
BAB VI HAK SIPIL DAN KEBEBASAN	23
A. Hak Atas Identitas.....	23
B. Fasilitas Informasi Layak Anak (Ila).....	28
C. Pelembagaan Partisipasi Anak.....	30
BAB V LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF	34
A. Pencegahan Perkawinan Usia Anak.....	36
B. Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak Bagi Orang Tua/ Keluarga	39
C. Lembaga Pengasuhan Alternatif.....	45
D. Infrastruktur (Sarana Dan Prasarana) Ramah Anak Di Ruang Publik	49
BAB VI KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN	55

A. Persalinan Di Fasilitas Kesehatan.....	57
B. Status Gizi Balita	63
C. Pemberian Makan Pada Bayi Dan Anak (Pmba) Usia Di Bawah 2 Tahun	66
D. Fasilitas Kesehatan Dengan Pelayanan Ramah Anak.....	69
E. Lingkungan Sehat (Akses Air Minum Dan Sanitasi Yang Layak).....	72
F. Kawasan Tanpa Rokok.....	74
BAB VII PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA	77
A. Wajib Belajar 12 Tahun.....	78
B. Sekolah Ramah Anak (Sra).....	82
C. Ketersediaan Fasilitas Untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, Dan Rekreatif Yang Ramah Anak.....	84
BAB VIII PERLINDUNGAN KHUSUS	89
A. Pencegahan Dalam Perlindungan Khusus	90
B. Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan Dan Eksploitasi	95
C. Anak Yang Dibebeaskan Dari Pekerja Anak (Pa) Dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Bpta).....	98
D. Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, Napza, Dan Terinfeksi Hiv/Aids	100
E. Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana Dan Konflik.....	102
F. Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, Dan Terisolasi	104
G. Pelayanan Bagi Anak Dengan Perilaku Sosial Menyimpang (Psm).....	106
H. Penyelesaian Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Melalui Diversi (Khusus Pelaku)	110
I. Pelayanan Bagi Anak Korban Jaringan Terorisme Dan Stigmatisasi Akibat Dari Pelabelan Terkait Dengan Kondisi Orang Tuanya	112
BAB IX PENYELENGGARAAN KLA DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	115
A. Penyelenggaraan Kla Di Kecamatan	118
B. Penyelenggaraan Kla Di Kelurahan.....	122

BAB X PENUTUP126

A. Kesimpulan126

B. Saran.....127



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak anak merupakan bagian tak terpisahkan dari strategi nasional dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter. Anak-anak bukan hanya generasi penerus, tetapi juga subjek pembangunan yang memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara dan pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah menginisiasi program Kota Layak Anak (KLA) sebagai pendekatan sistemik untuk mendorong pemerintah daerah mengintegrasikan isu anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Kota Jambi, sebagai ibu kota Provinsi Jambi, telah menunjukkan komitmen luar biasa dalam mendukung terwujudnya sistem pembangunan yang ramah anak. Komitmen ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diwujudkan melalui berbagai kebijakan strategis, inovasi program, dan sinergi lintas sektor yang berkelanjutan. Pada tahun 2025, Kota Jambi berhasil mencatatkan skor evaluasi KLA sebesar 938 poin, sebuah capaian yang menandai peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya dan menempatkan Kota Jambi sebagai salah satu kandidat kuat untuk meraih predikat tertinggi dalam penilaian nasional.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras dan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga hukum, dunia pendidikan, organisasi masyarakat, dan komunitas anak. Salah satu bentuk nyata dari sinergi tersebut adalah keberadaan Forum Anak Bumi Angso Duo, yang aktif di seluruh kecamatan dan kelurahan, serta berperan sebagai pelopor dan pelapor dalam isu-isu anak. Program edukatif seperti Pita Molin, yang memberikan penyuluhan tentang kekerasan anak langsung ke sekolah-sekolah, menjadi contoh inovasi lokal yang berdampak nyata. Selain itu, Kota Jambi juga telah mengembangkan 435 Sekolah Ramah Anak dari jenjang TK hingga SMP, serta 20 Puskesmas Ramah Anak yang telah terakreditasi tinggi².

Dari sisi kebijakan, Pemerintah Kota Jambi telah menerbitkan berbagai regulasi progresif seperti Perda Perlindungan Anak, Peraturan Wali Kota tentang Penurunan Stunting, dan Kawasan Tanpa Rokok, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Fasilitas publik juga telah disesuaikan dengan kebutuhan anak, seperti penyediaan Informasi Layak Anak melalui perpustakaan umum, mobil literasi keliling, dan pojok baca di ruang-ruang publik.

Penyusunan Profil Kota Layak Anak Tahun 2025 ini memiliki urgensi yang tinggi, tidak hanya sebagai bentuk dokumentasi capaian, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk:

- a. Menyediakan data dan informasi yang akurat sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan ke depan.

- b. Menjadi alat advokasi untuk memperkuat komitmen lintas sektor dalam pemenuhan hak anak.
- c. Mendorong partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha, dan anak-anak sendiri dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, Kota Jambi diharapkan mampu menjadi role model nasional dalam mewujudkan Indonesia Layak Anak 2030. Profil ini bukan sekadar laporan, tetapi cerminan dari tekad bersama untuk menjadikan anak sebagai pusat pembangunan dan menjamin masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang.

B. TUJUAN

Penyusunan Profil Kota Layak Anak Kota Jambi Tahun 2025 merupakan bagian integral dari komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam membangun sistem tata kelola pemerintahan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemenuhan hak anak. Profil ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai refleksi kolektif atas capaian, tantangan, dan inovasi yang telah dilakukan dalam mewujudkan Kota Jambi sebagai ruang hidup yang aman, nyaman, dan memberdayakan bagi anak-anak dari berbagai latar belakang.

Tujuan utama dari penyusunan profil ini adalah untuk menyediakan landasan data dan informasi yang akurat, komprehensif, dan terverifikasi mengenai kondisi anak di Kota Jambi, yang mencakup lima klaster utama KLA: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan

waktu luang dan kegiatan budaya; serta perlindungan khusus. Data ini menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berpihak pada anak, serta sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas program-program yang telah dijalankan.

Lebih jauh, profil ini bertujuan untuk memperkuat sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, lembaga hukum, dunia pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan media, dalam menciptakan ekosistem pembangunan yang ramah anak. Kolaborasi ini tercermin dalam berbagai inisiatif seperti Forum Anak Bumi Angso Duo yang aktif dalam musrenbang, Program Pita Molin yang menyasar edukasi pencegahan kekerasan di sekolah, serta penguatan kelembagaan seperti Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak yang tersebar di seluruh kecamatan.

Penyusunan profil juga dimaksudkan untuk mendokumentasikan praktik-praktik baik yang telah dilakukan oleh Kota Jambi, seperti penerbitan Perda Perlindungan Anak, Perwal Penurunan Stunting, dan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, yang semuanya berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi tumbuh kembang anak. Capaian skor 938 poin dalam asesmen KLA tahun 2025 menjadi bukti nyata bahwa Kota Jambi tidak hanya berkomitmen secara formal, tetapi juga secara substansial dalam mengarusutamakan isu anak dalam pembangunan daerah.

Selain itu, profil ini menjadi alat advokasi untuk memperkuat posisi Kota Jambi sebagai pionir dan role model nasional dalam mewujudkan Indonesia Layak Anak 2030. Dengan menghadirkan data otentik, narasi kebijakan, dan testimoni dari anak-anak serta masyarakat, profil ini diharapkan mampu

menginspirasi daerah lain untuk mengadopsi pendekatan serupa dalam pembangunan yang berorientasi pada hak anak.

Secara keseluruhan, tujuan dari penyusunan Profil Kota Layak Anak Tahun 2025 adalah untuk memastikan bahwa setiap anak di Kota Jambi tanpa terkecuali memiliki akses terhadap hak-haknya secara optimal, tumbuh dalam lingkungan yang mendukung, dan menjadi bagian aktif dari proses pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

C. SISTEMATIKA PENULISAN

Profil Kota Layak Anak (KLA) tahun 2024 terbagi dalam beberapa BAB diantaranya:

1. Pendahuluan
2. Gambaran Umum Kota Jambi
3. Penguatan Kelembagaan
4. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan
5. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
6. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
7. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan Kegiatan Budaya
8. Klaster Perlindungan Khusus
9. Kelana dan Dekelana
10. Penutup

D. SUMBER DATA

Penyusunan Profil Kota Layak Anak Kota Jambi Tahun 2025 didasarkan pada berbagai sumber data yang valid, terverifikasi, dan relevan dengan indikator pembangunan ramah anak. Data yang digunakan dalam profil ini berasal dari kombinasi antara data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui survei, sensus, laporan kelembagaan, serta hasil evaluasi program

lintas sektor. Sumber utama yang menjadi rujukan adalah publikasi resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi, khususnya dokumen Kota Jambi Dalam Angka 2025, yang menyediakan data demografi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak secara terpilah.

Selain itu, data juga diperoleh dari hasil verifikasi lapangan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), yang dilakukan secara daring dan langsung melibatkan Tim Gugus Tugas KLA Kota Jambi, perangkat daerah, serta mitra kelembagaan seperti Bapas, Kementerian Agama, dan komunitas pendidikan³. Proses ini menghasilkan data otentik mengenai capaian indikator KLA, termasuk skor evaluasi sebesar 938 poin yang diperoleh Kota Jambi pada tahun 2025. Sumber data lainnya mencakup:

- a. Laporan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi
- b. Dokumen kebijakan daerah, seperti Perda Perlindungan Anak, Perwal Penurunan Stunting, dan regulasi Kawasan Tanpa Rokok

Untuk memperkuat validitas data, profil ini juga mengacu pada hasil evaluasi nasional KLA, laporan kegiatan Forum Anak Bumi Angso Duo, serta testimoni dari anak-anak dan masyarakat yang terlibat langsung dalam program-program ramah anak. Dengan dukungan data yang kuat dan beragam, profil ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi anak di Kota Jambi, sekaligus menjadi dasar perencanaan dan advokasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. LETAK GEOGRAFIS

Secara geografis, Kota Jambi terletak di bagian timur Pulau Sumatra dan merupakan ibu kota dari Provinsi Jambi, Indonesia. Kota ini berada pada posisi strategis yang menjadikannya sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan layanan publik di wilayah provinsi. Letak astronomis Kota Jambi berada antara $01^{\circ}30'2,98''$ – $01^{\circ}07'1,07''$ Lintang Selatan dan $103^{\circ}40'1,67''$ – $103^{\circ}40'0,23''$ Bujur Timur, dengan titik koordinat pusat pada latitude $-1,607$ dan longitude $103,614$. Wilayah Kota Jambi memiliki ketinggian rata-rata antara 10 hingga 60 meter di atas permukaan laut, menjadikannya sebagai daerah dataran rendah yang relatif stabil secara topografi.

Kota Jambi memiliki luas wilayah sekitar $205,38$ km², dan secara administratif merupakan enklave dari Kabupaten Muaro Jambi, yang berarti seluruh batas wilayah Kota Jambi baik di utara, timur, selatan, maupun barat berbatasan langsung dengan kabupaten tersebut¹. Kondisi ini memberikan tantangan tersendiri dalam pengelolaan tata ruang dan konektivitas antarwilayah, namun juga membuka peluang kolaborasi lintas kabupaten dalam pembangunan yang inklusif dan ramah anak.

Dari segi batas wilayah, Kota Jambi berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi.

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi.

Kota Jambi memiliki topografi yang relatif datar dengan beberapa daerah yang memiliki kontur tanah berbukit. Ketinggian wilayah Kota Jambi berkisar antara 10 hingga 50 meter di atas permukaan laut, yang menjadikannya sebagai daerah yang cukup aman dari risiko bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor. Namun, karena berada di daerah dengan curah hujan tinggi, Kota Jambi masih menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan air dan potensi banjir di beberapa wilayah tertentu.

Salah satu elemen geografis yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Kota Jambi adalah Sungai Batanghari, yang merupakan sungai terpanjang di Sumatra. Sungai ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber air bagi masyarakat, tetapi juga menjadi jalur transportasi utama bagi aktivitas perdagangan dan distribusi barang. Keberadaan Sungai Batanghari juga berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi lokal, terutama dalam sektor perikanan dan perdagangan.

Selain itu, Kota Jambi memiliki beberapa kawasan hijau dan hutan kota yang berfungsi sebagai paru-paru kota serta area konservasi lingkungan. Keberadaan ruang terbuka hijau ini menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta memberikan manfaat bagi masyarakat dalam hal rekreasi dan kesehatan lingkungan.

Sebagai daerah yang berada di wilayah tropis, Kota Jambi memiliki dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya terjadi antara bulan Oktober hingga Maret, dengan curah hujan yang cukup tinggi dan kelembaban udara yang meningkat. Sementara itu,

musim kemarau berlangsung antara bulan April hingga September, dengan suhu udara yang lebih panas dan tingkat curah hujan yang lebih rendah.

Suhu rata-rata di Kota Jambi berkisar antara 24°C hingga 32°C, dengan kelembaban udara yang cukup tinggi sepanjang tahun. Kondisi ini berpengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat, terutama dalam sektor pertanian dan perkebunan. Tanaman seperti kelapa sawit, karet, dan padi menjadi komoditas utama yang berkembang di wilayah ini, karena mampu beradaptasi dengan kondisi iklim yang ada.

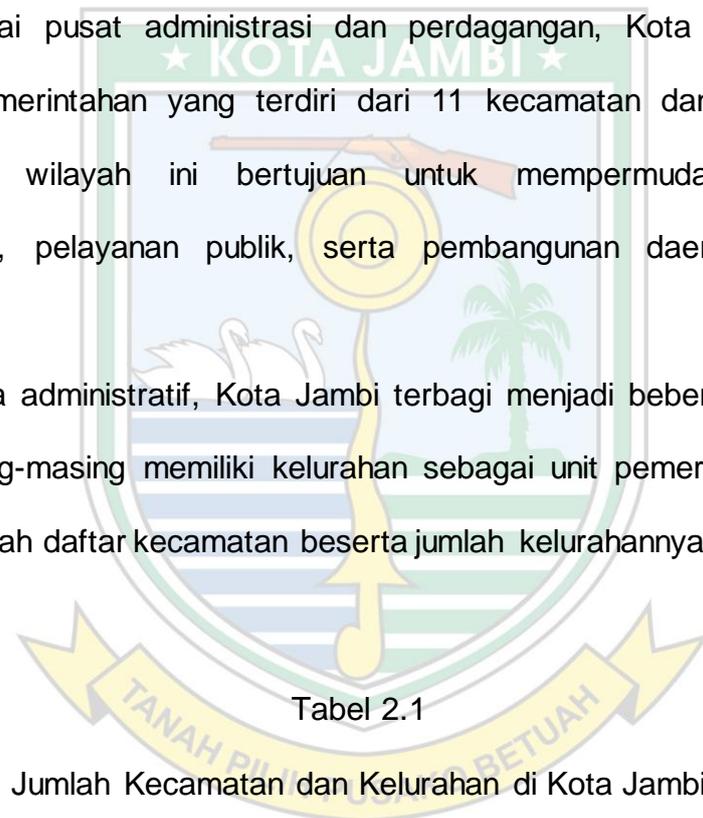
Selain itu, pola curah hujan yang tinggi juga berpengaruh terhadap potensi banjir di beberapa wilayah Kota Jambi. Daerah yang berada di sekitar Sungai Batanghari sering kali mengalami peningkatan debit air saat musim hujan, sehingga diperlukan sistem drainase yang baik untuk mengatasi risiko banjir. Pemerintah Kota Jambi telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan infrastruktur pengelolaan air, termasuk pembangunan tanggul dan sistem kanal untuk mengurangi dampak banjir terhadap pemukiman warga.

Keadaan geografis Kota Jambi memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan kota dan pola pemukiman masyarakat. Sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi di Provinsi Jambi, kota ini terus mengalami pertumbuhan yang pesat dalam berbagai sektor. Infrastruktur yang semakin maju serta aksesibilitas yang semakin baik menjadikan Kota Jambi sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam perdagangan, industri, dan pariwisata.

Keberadaan Sungai Batanghari sebagai jalur transportasi utama telah mendorong perkembangan sektor perdagangan dan distribusi barang. Banyak aktivitas ekonomi yang bergantung pada sungai ini, termasuk perdagangan hasil pertanian dan perkebunan. Selain itu, kawasan di sekitar sungai juga menjadi pusat pemukiman dan aktivitas sosial masyarakat, dengan berbagai fasilitas umum yang dibangun untuk mendukung kehidupan warga.

Sebagai pusat administrasi dan perdagangan, Kota Jambi memiliki struktur pemerintahan yang terdiri dari 11 kecamatan dan 68 kelurahan. Pembagian wilayah ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan administrasi, pelayanan publik, serta pembangunan daerah yang lebih merata.

Secara administratif, Kota Jambi terbagi menjadi beberapa kecamatan yang masing-masing memiliki kelurahan sebagai unit pemerintahan terkecil. Berikut adalah daftar kecamatan beserta jumlah kelurahannya:



Tabel 2.1

Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Jambi

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan
1.	Kota Baru	7
2.	Alam Barajo	7
3.	Jambi Selatan	5
4.	Paal Merah	6
5.	Jelutung	7
6.	Pasar Jambi	4
7.	Telanaipura	7

8.	Danau Sipin	5
9.	Danau Teluk	5
10.	Pelayangan	6
11.	Jambi Timur	9
Total		68

Sumber : BPS Kota Jambi tahun 2025

Pembagian kecamatan dan kelurahan di Kota Jambi memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Setiap kecamatan memiliki kewenangan dalam mengelola berbagai aspek pemerintahan, termasuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pengelolaan sumber daya lokal.

Kelurahan sebagai unit pemerintahan terkecil berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Kelurahan bertanggung jawab dalam berbagai program sosial, seperti pemberdayaan masyarakat, pengelolaan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan warga. Selain itu, kelurahan juga berperan dalam mendukung program pemerintah daerah, seperti peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, serta pengembangan ekonomi lokal.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Kota Jambi telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Program digitalisasi administrasi, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, serta pembangunan infrastruktur publik menjadi bagian dari strategi untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan posisi geografis yang strategis dan aksesibilitas yang baik, Kota Jambi memiliki potensi besar untuk terus berkembang sebagai kota yang inklusif dan layak anak. Letak ini juga mendukung integrasi layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak secara merata di seluruh kecamatan, serta memudahkan mobilisasi program-program pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak anak.

B. VISI DAN MISI KOTA JAMBI

Visi dapat diartikan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Visi yang dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun kedepan untuk periode tahun 2025 - 2030 adalah :

“MEWUJUDKAN KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG BERSIH, AMAN, HARMONIS, AGAMIS, INOVATIF DAN SEJAHTERA”

Adapun misi dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Penguatan ketertiban, ketenteraman lingkungan, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan
2. Penguatan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan
3. Penguatan kapasitas ekonomi perkotaan
4. Penguatan kualitas sumber daya manusia
5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik

BAB III

KELEMBAGAAN

Kelembagaan merupakan fondasi penting dalam sistem pemerintahan dan pembangunan yang berfungsi sebagai kerangka kerja bagi pelaksanaan kebijakan, program, dan pelayanan publik. Dalam konteks yang lebih luas, kelembagaan mencakup struktur organisasi, mekanisme kerja, regulasi, serta norma-norma sosial yang mengatur interaksi antar individu, kelompok, dan institusi dalam masyarakat. Ia menjadi instrumen utama dalam menciptakan keteraturan, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya serta dalam menjamin akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Di tingkat daerah, kelembagaan berperan sebagai penggerak pembangunan yang berkelanjutan, bukan hanya sebagai wadah administratif, tetapi juga sebagai entitas strategis yang mampu mengintegrasikan visi pembangunan dengan kebutuhan riil masyarakat. Kelembagaan yang kuat dan adaptif mencerminkan kapasitas suatu daerah dalam merespons tantangan pembangunan yang kompleks dan dinamis, serta menjadi jembatan antara kebijakan dan implementasi, antara perencanaan dan realisasi, serta antara pemerintah dan warga.

Dalam kerangka pembangunan Kota Layak Anak (KLA), kelembagaan memiliki makna yang lebih spesifik dan strategis. Ia menjadi pilar utama dalam menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui sistem yang terintegrasi, lintas sektor, dan berbasis hak anak. Kelembagaan KLA dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proses pembangunan di daerah memperhatikan, menghormati, dan memenuhi hak-

hak anak secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan amanat Konvensi Hak Anak dan kebijakan nasional yang mendorong daerah untuk membangun lingkungan yang ramah dan aman bagi anak. Kelembagaan KLA mencakup pembentukan Tim Gugus Tugas KLA, penyusunan regulasi daerah yang mendukung hak anak, penguatan peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pelibatan aktif masyarakat dan anak itu sendiri. Tim Gugus Tugas KLA bertugas mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan KLA secara sinergis dan berkesinambungan, sementara Forum Anak menjadi wadah partisipasi anak dalam menyuarakan pendapat dan berkontribusi dalam perencanaan pembangunan.

Untuk mendukung kelembagaan KLA, pemerintah telah menetapkan sejumlah regulasi yang menjadi dasar hukum dan pedoman pelaksanaannya. Salah satu regulasi utama adalah Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, yang mengatur tujuan KLA, peran serta masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan KLA. Peraturan ini menegaskan bahwa kebijakan KLA bertujuan untuk mewujudkan kabupaten/kota yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Selain itu, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 12 Tahun 2022 juga menjadi acuan penting dalam penyelenggaraan KLA, yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penetapan peringkat KLA. Permen ini memperhatikan kelembagaan sebagai komponen utama, bersama lima klaster hak anak yang meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan

kesejahteraan, pendidikan dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus anak.

Regulasi lainnya yang turut memperkuat kelembagaan KLA antara lain Permen PPPA Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan KLA, Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA, dan Permen PPPA Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan KLA. Dalam regulasi tersebut, kelembagaan diharuskan untuk menjamin partisipasi anak melalui mekanisme konsultatif yang inklusif, serta memastikan bahwa pandangan anak diperhatikan dalam setiap tahapan pengembangan KLA. Dengan dukungan regulasi yang jelas dan komprehensif, kelembagaan KLA diharapkan mampu menjadi motor penggerak perubahan menuju kota yang benar-benar layak bagi anak. Pemerintah Kota Jambi, melalui komitmen kelembagaan yang kuat, terus berupaya membangun sistem yang menjamin hak anak secara menyeluruh, menjadikan anak sebagai subjek pembangunan, dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa.

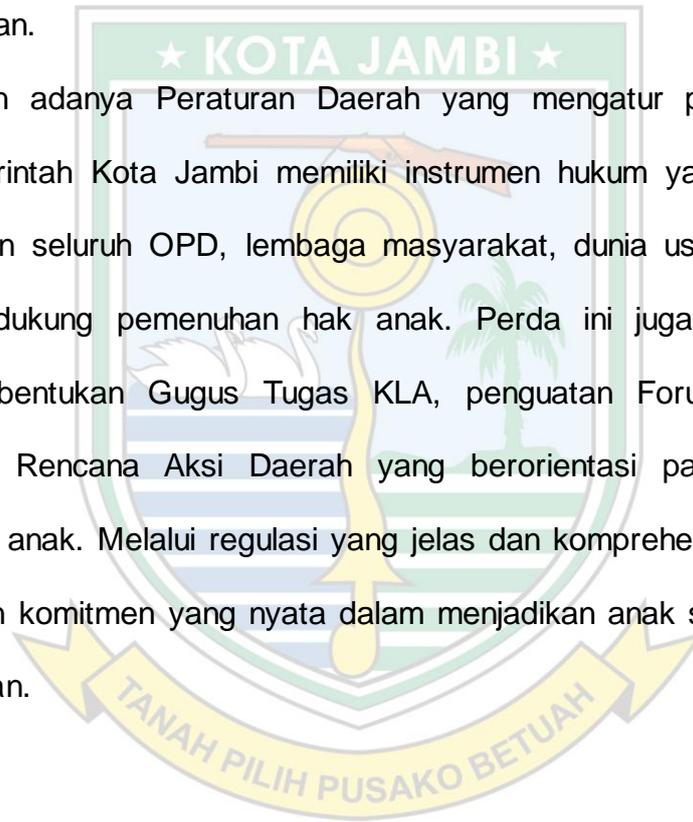
A. PERATURAN DAERAH

Dalam upaya mewujudkan Kota Jambi sebagai Kota Layak Anak, keberadaan peraturan daerah menjadi elemen penting yang memperkuat kelembagaan dan menjamin keberlanjutan program KLA secara sistematis dan terstruktur. Peraturan daerah (Perda) berfungsi sebagai payung hukum yang memberikan legitimasi terhadap seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Melalui Perda, pemerintah daerah memiliki landasan yang kuat

untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip KLA ke dalam seluruh aspek pembangunan, serta memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak.

Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan KLA biasanya memuat ketentuan umum, prinsip dasar, kelembagaan, peran serta masyarakat dan dunia usaha, rencana aksi daerah, pendanaan, serta mekanisme evaluasi dan pelaporan.

Dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan KLA, Pemerintah Kota Jambi memiliki instrumen hukum yang kokoh untuk mengarahkan seluruh OPD, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media dalam mendukung pemenuhan hak anak. Perda ini juga menjadi dasar dalam pembentukan Gugus Tugas KLA, penguatan Forum Anak, serta penyusunan Rencana Aksi Daerah yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Melalui regulasi yang jelas dan komprehensif, Kota Jambi menunjukkan komitmen yang nyata dalam menjadikan anak sebagai prioritas pembangunan.



Tabel 3.1

Kebijakan Pemerintah Kota Jambi dalam mendukung KLA

NO	NOMOR/ TAHUN	TENTANG
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Peraturan Daerah		
1.	03/ 2024	Penyelenggaraan Kota Layak Anak
2.	01/ 2017	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga di Kota Jambi
3.	03/ 2017	Kawasan tanpa rokok
4.	04/ 2017	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Jambi
5.	05/ 2017	Penyelenggaraan perlindungan anak
6.	15/ 2017	Penyelenggaraan Keparawisataan
7.	14/ 2015	Pemeriksaan kualitas air
8.	10/ 2016	Administrasi Kependudukan
9.	10/ 2016	Administrasi Kependudukan
10.	12/ 2015	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
11.	14/ 2015	Pemeriksaan kualitas air
12.	11/ 2013	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kota Jambi
Peraturan Walikota		
1.	05/ 2024	Penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Kota Jambi
2.	09/ 2020	Kota Layak Anak
3.	51/ 2020	Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme di Kota Jambi
4.	72/ 2020	Pendidikan anak usia dini
5.	161/ 2020	Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

NO	NOMOR/ TAHUN	TENTANG
1	2	3
		Kota Jambi
6.	09/ 2019	Pembentukan UPTD PPA Kota Jambi
7.	35/ 2019	Pencegahan perkawinan pada usia anak
8.	37/ 2019	Tatacara dan mekanisme perlindungan anak di Kota Jambi
9.	46/ 2019	Sistem informasi dan komunikasi obstetric secara online di Kota Jambi
10.	02/ 2017	Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya
11.	05/ 2011	Komisi Penanggulangan AIDS
Instruksi Walikota		
1.	18/ 2022	Pemberlakuan/pengawasan terhadap aktivitas keberadaan kelompok kriminal anak bermotor di kota jambi
Surat Edaran		
1.	87/ 2022	Tata Kelola penyebaran informasi layak anak
2.	288/ 2022	Penggunaan internet sehat dan aman di wilayah Kota Jambi

Sumber : DPMPPA Kota Jambi, 2025

B. PENGUATAN KELEMBAGAAN

Penguatan kelembagaan KLA, yaitu upaya untuk memperkuat kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, lembaga masyarakat dan dunia usaha pada suatu wilayah administrasi pemerintahan agar proaktif dalam upaya memenuhi hak anak yang dilakukan melalui

advokasi, sosialisasi dan fasilitasi di bidang ketenagaan, anggaran, sarana prasarana, metoda dan teknologi.

Kelembagaan KLA harus melakukan peningkatan komitmen yang termasuk ke dalam tahapan persiapan pengembangan KLA. Peningkatan komitmen dalam KLA meliputi upaya memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan KLA. Dukungan dari para pengambil keputusan di Kabupaten/Kota untuk menjadikan daerahnya menjadi KLA sangat penting dituangkan dalam bentuk tertulis untuk menjaga agar pengembangan KLA bukan dilakukan hanya karena desakan atau keperluan sesaat saja.

Kelembagaan KLA Kota Jambi tergambar pada Gugus Tugas KLA Kota Jambi, sebagai lembaga yang paling menentukan terlaksananya KLA di tingkat Kabupaten/Kota. Gugus Tugas KLA Kota Jambi tercantum dalam Keputusan Walikota Jambi nomor 195 tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Walikota Jambi nomor 74 tahun 2020 tentang gugus tugas Kota Layak Anak Kota Jambi. Gugus tugas KLA yang disusun mempunyai tugas :

1. Mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA
2. Mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA
3. Mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam penyelenggaraan KLA
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA
5. Menyusun laporan penyelenggaraan KLA kepada Walikota secara berkala

Untuk memaksimalkan kinerja gugus tugas, Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan

Anak Kota Jambi telah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis konvensi hak anak bagi anggota gugus tugas Kota Layak Anak Kota Jambi. Dengan diadakan kegiatan ini diharapkan memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang hak-hak anak, pencegahan dan penanganan angka kekerasan teradap anak baik di rumah, masyarakat maupun di lingkungan Sekolah serta paham tentang penyelesaian masalah anak sesuai dengan ranah dan tempat kejadiannya.



Pengukuhan Forum Anak Daerah Bumi Angso Duo Kota Jambi masa bakti 2025 – 2027

C. PERAN LEMBAGA MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN MEDIA MASA

Dalam upaya mewujudkan Kota Jambi sebagai Kota Layak Anak (KLA), keterlibatan berbagai elemen non-pemerintah menjadi aspek yang tak terpisahkan. Lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan program KLA, baik melalui advokasi, penyediaan layanan, maupun penyebarluasan

informasi yang berpihak pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan ketiga unsur ini mencerminkan pendekatan multi-sektor yang menjadi prinsip dasar dalam pembangunan berbasis hak anak.

Lembaga masyarakat di Kota Jambi telah menunjukkan kontribusi nyata dalam berbagai aspek perlindungan dan pemenuhan hak anak. Berbagai organisasi non-pemerintah, komunitas lokal, dan kelompok relawan aktif dalam kegiatan edukasi, pendampingan anak, serta kampanye anti-kekerasan. Mereka menjadi garda terdepan dalam menjangkau kelompok anak yang rentan, seperti anak jalanan, anak dengan disabilitas, dan anak korban kekerasan. Selain itu, lembaga masyarakat juga berperan dalam membangun kesadaran publik melalui pelatihan dan sosialisasi tentang hak anak, pengasuhan positif, dan pencegahan kekerasan berbasis gender.

Dunia usaha di Kota Jambi turut mengambil bagian dalam mendukung KLA melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Beberapa perusahaan telah menginisiasi kegiatan yang ramah anak, seperti pembangunan ruang bermain, penyediaan beasiswa, pelatihan keterampilan untuk anak dan remaja, serta dukungan terhadap kegiatan Forum Anak. Dunia usaha juga mulai menerapkan prinsip bisnis yang menghormati hak anak, termasuk kebijakan anti eksploitasi dan perlindungan terhadap pekerja anak. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kekuatan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara holistik.

Media massa, baik cetak, elektronik, maupun digital, memiliki peran vital dalam membentuk opini publik dan menyebarkan informasi yang mendidik serta melindungi anak. Di Kota Jambi, media lokal telah

berkontribusi dalam menyuarakan isu-isu anak melalui pemberitaan yang konstruktif, kampanye publik, dan peliputan kegiatan KLA. Media juga berperan sebagai pengawas sosial yang mendorong akuntabilitas pemerintah dan masyarakat dalam pemenuhan hak anak. Selain itu, media menjadi sarana edukasi yang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan pengasuhan, pencegahan kekerasan, dan promosi nilai-nilai ramah anak kepada khalayak luas.

Sinergi antara lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa dengan pemerintah daerah menunjukkan bahwa pembangunan Kota Layak Anak bukanlah tanggung jawab tunggal pemerintah, melainkan gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dengan memperkuat peran dan kolaborasi ketiga unsur ini, Kota Jambi semakin mendekati visinya sebagai kota yang menjamin hak, perlindungan, dan partisipasi anak dalam setiap aspek kehidupan.

Tabel 3.2
Keterlibatan Masyarakat, Dunia Usaha dan

Peran		
Masyarakat	Dunia Usaha	Media Masa
Kampanye KLA untuk RT-RT di kelurahan Ekajaya	Sosialisasi KLA pada kelompok UP2K	Media online tentang berita Perda KLA dan Perwalnya
Kampanye KLA oleh LAM kecamatan	Kampanye KLA pada ASBAJA	instagram Humas Kota Jambi tentang KLA
Sosialisasi KLA pada seluruh kader PKK di griyamayang	Sosialisasi KLA pada CSR	Videotron tentang KLA

Media Masa Dalam Mendukung KLA di Kota Jambi tahun 2024

Sumber: DPMPPA Kota Jambi, 2025

BAB VI

HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

A. HAK ATAS IDENTITAS

Hak atas identitas merupakan hak sipil yang paling mendasar dan menjadi titik awal dari seluruh proses pemenuhan hak anak. Identitas bukan sekadar nama dan tanggal lahir, melainkan pengakuan resmi dari negara bahwa seorang anak telah lahir dan berhak atas perlindungan, pelayanan, serta partisipasi dalam kehidupan sosial. Di Kota Jambi, pemenuhan hak atas identitas menjadi prioritas utama dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA), karena tanpa identitas yang sah, anak-anak berisiko terpinggirkan dari sistem layanan publik dan perlindungan hukum.

Wujud nyata dari hak atas identitas tercermin dalam kepemilikan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA). Akta kelahiran adalah dokumen legal yang menandai pengakuan negara terhadap kelahiran seorang anak, sedangkan KIA adalah bentuk lanjutan dari identitas anak yang memperkuat posisi mereka dalam sistem administrasi kependudukan. Kedua dokumen ini menjadi syarat penting bagi anak untuk mengakses pendidikan formal, layanan kesehatan, perlindungan sosial, dan berbagai fasilitas publik lainnya. Tanpa akta kelahiran, anak tidak dapat didaftarkan ke sekolah secara resmi, tidak memiliki nomor induk kependudukan, dan tidak tercatat dalam sistem perlindungan sosial. Tanpa KIA, anak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan layanan yang dirancang khusus untuk mereka, termasuk

diskon transportasi, akses perpustakaan, dan partisipasi dalam kegiatan komunitas.

Pemerintah Kota Jambi telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memastikan setiap anak memiliki identitas yang tercatat secara resmi. Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), berbagai program percepatan pencatatan kelahiran telah dilaksanakan secara terintegrasi dengan layanan kesehatan. Salah satu inovasi yang berhasil diterapkan adalah integrasi layanan akta kelahiran dengan proses persalinan di rumah sakit dan puskesmas. Dengan pendekatan ini, orang tua dapat langsung mengurus akta kelahiran anak sesaat setelah kelahiran, tanpa harus kembali ke kantor dinas atau melalui proses birokrasi yang panjang. Hal ini tidak hanya mempercepat proses pencatatan, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen identitas anak.

Selain itu, Pemerintah Kota Jambi juga aktif mendorong penerbitan KIA secara masif melalui kerja sama dengan sekolah-sekolah, posyandu, dan lembaga masyarakat. Program ini dilakukan dengan pendekatan kolektif, di mana data anak dikumpulkan secara sistematis dan diproses secara terpusat untuk penerbitan KIA. Beberapa sekolah bahkan telah menjadikan KIA sebagai syarat administrasi dalam pendaftaran peserta didik baru, sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan nasional pemenuhan hak identitas anak. Dengan adanya KIA, anak-anak Kota Jambi tidak hanya memiliki bukti legal identitas, tetapi juga merasa diakui dan dihargai sebagai bagian dari masyarakat.

Namun, tantangan tetap ada. Masih terdapat anak-anak di wilayah pinggiran kota, daerah terpencil, dan komunitas rentan yang belum memiliki akta kelahiran atau KIA. Faktor-faktor seperti keterbatasan akses informasi, kondisi ekonomi keluarga, dan kendala administratif menjadi penghalang utama dalam pemenuhan hak atas identitas. Untuk menjawab tantangan ini, Pemerintah Kota Jambi mengembangkan program jemput bola dan pelayanan keliling, di mana petugas Disdukcapil mendatangi langsung masyarakat untuk melakukan pencatatan dan penerbitan dokumen identitas anak. Program ini terbukti efektif dalam menjangkau kelompok yang selama ini terpinggirkan dari sistem layanan publik.

Edukasi dan sosialisasi juga menjadi bagian penting dari strategi pemenuhan hak atas identitas. Pemerintah Kota Jambi secara aktif melakukan kampanye melalui media lokal, forum warga, dan kegiatan komunitas untuk meningkatkan kesadaran orang tua tentang pentingnya memiliki dokumen identitas anak. Dalam kampanye ini, ditekankan bahwa tanpa akta kelahiran dan KIA, anak-anak berisiko kehilangan akses terhadap pendidikan formal, kesulitan mendapatkan layanan kesehatan, dan tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai jika terjadi kasus kekerasan atau eksploitasi.

Pemenuhan hak atas identitas juga memiliki dimensi psikologis dan sosial yang mendalam. Dengan memiliki identitas yang sah, anak merasa diakui, dihargai, dan memiliki tempat dalam masyarakat. Identitas memberikan rasa aman dan kepastian hukum, serta membuka peluang bagi anak untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan pembangunan daerah. Dalam konteks Kota Layak Anak, pemenuhan hak atas identitas

menjadi landasan bagi terciptanya lingkungan yang inklusif, adil, dan ramah anak, di mana setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, Pemerintah Kota Jambi terus memperkuat komitmen dan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun anak yang tertinggal dalam pemenuhan hak atas identitas. Melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media, Kota Jambi bergerak menuju visi besar sebagai kota yang menjamin hak-hak anak secara menyeluruh. Akta kelahiran dan KIA bukan hanya dokumen, tetapi simbol pengakuan, perlindungan, dan harapan bagi masa depan anak-anak Jambi.

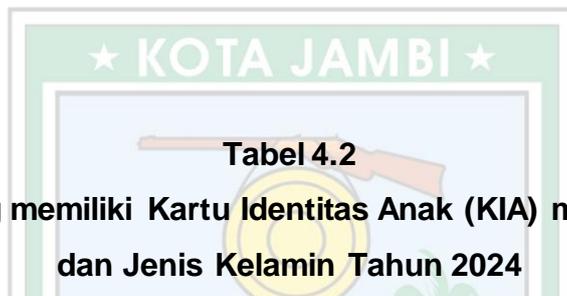
Tabel 4.1

Jumlah Anak yang memiliki Akta Kelahiran Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin tahun 2024

NO	KECAMATAN	KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	
1	TELANAIPURA	8.633	8.086	16.719
2	JAMBI SELATAN	8.459	8.086	16.545
3	JAMBI TIMUR	9.478	8.866	18.344
4	PASAR JAMBI	1.431	1.406	2.837
5	PELAYANGAN	2.187	2.053	4.240
6	DANAU TELUK	2.068	1.878	3.946
7	KOTA BARU	14.690	13.591	28.281
8	JELUTUNG	8.573	8.118	16.691

NO	KECAMATAN	KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	
9	ALAM BARAJO	18.407	17.226	35.633
10	DANAU SIPIN	6.229	5.908	12.137
11	PAAL MERAH	17.779	16.612	34.391
JUMLAH		97.934	91.830	189.764

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, 2025



Tabel 4.2
Jumlah Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

NO	KECAMATAN	KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	
1	TELANAIPURA	4.473	4.287	8.760
2	JAMBI SELATAN	4.490	4.560	9.050
3	JAMBI TIMUR	5.323	5.091	10.414
4	PASAR JAMBI	744	784	1.528
5	PELAYANGAN	1.036	1.022	2.058
6	DANAU TELUK	904	868	1.772
7	KOTA BARU	8.038	7.795	15.833
8	JELUTUNG	4.570	4.506	9.076
9	ALAM BARAJO	9.686	9.346	19.032
10	DANAU SIPIN	3.378	3.302	6.680
11	PAAL MERAH	9.330	9.107	18.437
JUMLAH		51.972	50.668	102.640

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, 2025

B. FASILITAS INFORMASI LAYAK ANAK (ILA)

Sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak anak atas informasi yang sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan mereka, Pemerintah Kota Jambi telah menginisiasi pengembangan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA) di berbagai titik strategis. Fasilitas ini dirancang untuk menjadi ruang edukatif, interaktif, dan ramah anak, yang memungkinkan anak-anak memperoleh informasi yang bermanfaat, aman, dan mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal.

Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) secara aktif melakukan monitoring terhadap kualitas dan keberfungsian ILA. Kegiatan ini meliputi evaluasi konten informasi, keterlibatan anak dalam pengelolaan fasilitas, serta integrasi ILA dengan program literasi digital dan kampanye anti-hoaks di kalangan anak dan remaja. Dalam beberapa kasus, Forum Anak Kota Jambi juga dilibatkan sebagai mitra dalam penyusunan konten dan penyampaian informasi yang relevan bagi kelompok usia mereka.

Meski capaian ini menunjukkan kemajuan, tantangan tetap ada dalam hal pemerataan akses dan keberlanjutan operasional ILA, khususnya di wilayah pinggiran kota dan daerah dengan keterbatasan infrastruktur. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, komunitas, dan dunia usaha menjadi kunci untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas Fasilitas Informasi Layak Anak di masa mendatang.

Dengan adanya ILA yang terintegrasi dan partisipatif, Kota Jambi semakin mendekatkan diri pada visi sebagai kota yang menjamin hak anak atas informasi yang aman, mendidik, dan memberdayakan. Fasilitas ini

bukan hanya menjadi sumber pengetahuan, tetapi juga simbol komitmen daerah dalam membangun generasi yang cerdas, kritis, dan berdaya.

Tabel 4.3

Lembaga Layanan Informasi Anak (ILA) Kota Jambi Tahun 2025

No	Jenis Lembaga Layanan Informasi Anak	Nama Lembaga Layanan Informasi Anak	Alamat Lembaga dan NomorKontak	Ketua	Jenis Produk (buku, KIE, aplikasi, dll)	Aktivitas lembaga layanan informasianak	Jumlah Keanggotaan Anak
1	Perpustakaan Umum	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi	Jl. Soemantri Brodjonegoro Kel. Sungai Puteri Kec. Danau Sipin Kota Jambi	Arzi Efendi, SH	Buku	Kunjungan Edukasi	111
					Aplikasi i- Jambi Kota	Perpustakaan Keliling	
					Alat permainan edukatif	Kegiatan Literasi Anak	
					Multi Media Sistem	Lomba Bercerita Rakyat	
					Leaflet	Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	
					Brosur	Pembekalan Menulis untuk siswaSMP	
2	Mobil Perpustakaan Keliling	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi	Jl. Soemantri Brodjonegoro Kel. Sungai Puteri Kec. Danau Sipin Kota Jambi	Arzi Efendi, SH	Buku-Buku Informasi	Kunjungan Ke Sekolah	259
						Kunjungan Ke LPKA	
						Kunjungan Ke LPKS	
3	Gerobak Motor Perpustakaan Keliling	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi	Jl. Soemantri Brodjonegoro Kel. Sungai Puteri Kec. Danau Sipin	Arzi Efendi, SH	Buku-Buku Informasi	Kunjungan Ke Sekolah dan Taman-taman Kota	138
4	Pojok Baca Taman Kongkow	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi	Jl. Koprak Sardi Rt. 25 Kel. Paal Lima Kota Baru Jambi	Arzi Efendi, SH	Buku-Buku Informasi	Kunjungan Anak-anak ke Taman Kongkow	98

No	Jenis Lembaga Layanan Informasi Anak	Nama Lembaga Layanan Informasi Anak	Alamat Lembaga dan Nomor Kontak	Ketua	Jenis Produk (buku, KIE, aplikasi, dll)	Aktivitas lembaga layanan informasi anak	Jumlah Keanggotaan Anak
5	Pojok Baca Taman Remaja	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi	Jl. Haji Agus Salim Paal Lima Kota Baru	Azri Efendi, SH	Buku-Buku Informasi	Kunjungan Di Taman Remaja	
6	Pojok Baca Digital Taman Jaksa	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi	Jl. Prof. Dr. Sri Sudewi, Simpang III Sipin Kota Jambi	Azri Efendi, SH	Buku-Buku Informasi	Pemanfaat Perpustakaan Digital di Taman Jaksa	147

Sumber : DPMPPA Kota Jambi, 2025

C. PELEMBAGAAN PARTISIPASI ANAK

Di tengah arus pembangunan yang semakin kompleks, suara anak-anak sering kali tenggelam dalam hiruk-pikuk kebijakan orang dewasa. Padahal, anak bukan sekadar penerima manfaat pembangunan, melainkan subjek aktif yang memiliki hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan dilibatkan dalam proses yang menyangkut kehidupan mereka. Prinsip ini tercermin dalam Konvensi Hak Anak, yang telah menjadi landasan hukum dan moral bagi negara-negara, termasuk Indonesia, dalam menjamin hak partisipasi anak secara bermakna.

Kota Jambi, sebagai salah satu kota yang berkomitmen mewujudkan Kota Layak Anak (KLA), telah mengambil langkah nyata dalam pelebagaan partisipasi anak. Tidak lagi sebatas seremoni atau formalitas, partisipasi anak di Kota Jambi telah diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan dan kehidupan sosial secara lebih substansial. Pemerintah Kota Jambi menyadari bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak yang akan menjadi pewaris masa depan kota.

Salah satu wujud pelebagaan ini adalah keberadaan Forum Anak Kota Jambi, sebuah wadah resmi yang menjadi ruang ekspresi, advokasi, dan kontribusi anak-anak terhadap isu-isu yang mereka hadapi. Forum ini bukan sekadar organisasi, melainkan representasi dari semangat anak-anak untuk menjadi pelopor perubahan dan pelapor terhadap pelanggaran hak anak. Dengan struktur yang demokratis dan kepemimpinan yang dipilih secara partisipatif, Forum Anak telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang ramah anak.

Forum Anak tidak hanya hadir di tingkat kota, tetapi juga telah menjangkau kecamatan dan kelurahan. Di setiap tingkatan, anak-anak dilatih untuk memahami hak-hak mereka, menyampaikan aspirasi, dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Anak (Musrenbang Anak), mereka menyampaikan usulan program yang mencerminkan kebutuhan riil di lapangan—mulai dari fasilitas bermain yang aman, kampanye anti-bullying, hingga edukasi kesehatan reproduksi remaja. Usulan-usulan ini tidak hanya didengar, tetapi juga diakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah, menunjukkan bahwa suara anak memiliki nilai dan pengaruh yang nyata.

Pemerintah Kota Jambi juga telah menyusun Pedoman Partisipasi Anak, yang menjadi acuan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekolah, dan lembaga masyarakat dalam melibatkan anak secara etis dan bermakna. Pedoman ini menekankan prinsip inklusivitas, keamanan, dan penghormatan terhadap keberagaman anak, termasuk anak disabilitas dan anak dari kelompok rentan. Partisipasi anak juga diintegrasikan dalam

Tim Gugus Tugas KLA, di mana perwakilan Forum Anak dilibatkan dalam rapat koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan indikator KLA.

Namun, pelembagaan partisipasi anak bukan tanpa tantangan. Masih terdapat kesenjangan kapasitas antar anak, terutama antara mereka yang tinggal di pusat kota dan di wilayah pinggiran. Tidak semua anak memiliki akses yang sama terhadap informasi, pelatihan, dan kesempatan untuk berpartisipasi. Di sisi lain, pemahaman orang dewasa terhadap hak partisipasi anak juga masih perlu diperkuat. Masih ada anggapan bahwa anak belum cukup matang untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga suara mereka kerap diabaikan atau dianggap tidak relevan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kota Jambi terus melakukan inovasi. Pelatihan kepemimpinan, literasi hak anak, dan advokasi sosial menjadi bagian dari strategi penguatan kapasitas anak. Sekolah-sekolah didorong untuk membentuk Forum Anak Sekolah sebagai bagian dari implementasi Sekolah Ramah Anak, sehingga partisipasi anak tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga di lingkungan pendidikan. Pemerintah juga mulai mengembangkan platform digital partisipasi anak, agar anak-anak dapat menyampaikan aspirasi mereka secara lebih luas dan aman.

Pelembagaan partisipasi anak di Kota Jambi bukan sekadar memenuhi indikator teknis KLA, tetapi merupakan refleksi dari komitmen moral dan politik untuk membangun generasi muda yang berdaya, kritis, dan peduli terhadap lingkungan sosialnya. Ketika anak-anak diberi ruang untuk berbicara, didengar, dan dilibatkan, maka pembangunan tidak hanya menjadi

lebih adil, tetapi juga lebih bermakna. Kota Jambi telah membuktikan bahwa ketika anak-anak diberi tempat dalam proses pembangunan, mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pencipta masa depan yang lebih baik.



Kegiatan perekrutan anggota baru forum anak Kota Jambi tahun 2025



BAB V

LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Keluarga adalah fondasi utama dalam pembentukan karakter, nilai, dan kesejahteraan anak. Di dalam keluarga, anak belajar mengenal dunia, membangun kepercayaan diri, dan merasakan kasih sayang yang menjadi dasar bagi perkembangan psikososialnya. Oleh karena itu, kualitas lingkungan keluarga sangat menentukan keberhasilan pemenuhan hak anak secara menyeluruh. Pemerintah Kota Jambi menyadari bahwa membangun Kota Layak Anak tidak cukup hanya dengan kebijakan publik, tetapi harus dimulai dari penguatan unit terkecil masyarakat: keluarga.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Jambi telah mengembangkan berbagai program penguatan keluarga yang berfokus pada peningkatan kapasitas orang tua dalam pengasuhan yang positif dan bebas kekerasan. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), pemerintah menyelenggarakan pelatihan parenting, kampanye pengasuhan berbasis hak anak, serta layanan konseling keluarga. Program ini menyoar keluarga dari berbagai latar belakang, termasuk keluarga miskin, keluarga tunggal, dan keluarga dengan anak berkebutuhan khusus. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan rumah yang aman, suportif, dan mampu memenuhi kebutuhan dasar anak secara fisik maupun emosional.

Pemerintah daerah juga mendorong pendekatan pengasuhan berbasis komunitas, di mana masyarakat dilibatkan dalam mendampingi anak-anak yang tidak tinggal bersama orang tua kandung. Program seperti "Orang Tua Asuh" dan "Kampung Ramah Anak" menjadi contoh bagaimana solidaritas

sosial dapat menjadi kekuatan dalam menjaga anak-anak yang berada dalam situasi rentan. Pendekatan ini tidak hanya memberikan perlindungan fisik, tetapi juga membangun rasa memiliki dan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak dalam pengasuhan alternatif.

Di sisi lain, tantangan masih dihadapi dalam hal pemenuhan standar pengasuhan di lembaga alternatif. Beberapa LKSA masih mengalami keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, dan pendanaan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Jambi terus melakukan pembinaan, audit layanan, dan pelatihan bagi pengasuh agar mereka mampu menjalankan tugas dengan pendekatan yang ramah anak dan berbasis hak. Kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan akademisi juga menjadi strategi penting dalam memperkuat ekosistem pengasuhan alternatif yang berkualitas.

Pemerintah Kota Jambi juga telah membentuk dan menguatkan Forum Anak Kota Jambi sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan. Forum ini menjadi ruang aman bagi anak-anak untuk menyuarakan aspirasi mereka, termasuk dalam hal pengasuhan dan kehidupan keluarga. Kegiatan seperti diskusi kelompok terfokus, kampanye anti-kekerasan, dan pelatihan kepemimpinan anak telah menjadi bagian dari upaya membangun generasi yang sadar hak dan tangguh secara emosional.

Tantangan yang dihadapi dalam klaster ini masih cukup kompleks, seperti meningkatnya angka perceraian, keterbatasan akses terhadap layanan konseling keluarga, serta minimnya pemahaman sebagian masyarakat tentang pengasuhan berbasis hak anak. Namun demikian, komitmen Pemerintah Kota Jambi untuk mewujudkan lingkungan keluarga

yang layak bagi anak terus diperkuat melalui kebijakan yang inklusif, kolaborasi lintas sektor, dan peningkatan kapasitas SDM di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, Kota Jambi menunjukkan komitmen yang kuat dalam menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung tumbuh kembang anak dan menyediakan pengasuhan alternatif yang layak bagi anak-anak yang membutuhkan. Upaya ini tidak hanya memenuhi indikator KLA, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial yang menjadi fondasi bagi pembangunan kota yang inklusif dan berkeadilan.

A. PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK

Perkawinan usia anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak anak yang berdampak luas terhadap aspek kesehatan, pendidikan, psikososial, dan ekonomi. Anak yang menikah di usia dini berisiko tinggi mengalami putus sekolah, kehamilan berisiko, kekerasan dalam rumah tangga, serta keterbatasan dalam mengembangkan potensi diri secara optimal. Oleh karena itu, pencegahan perkawinan usia anak menjadi prioritas penting dalam upaya mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Jambi.

Pemerintah Kota Jambi memandang isu ini sebagai tantangan multidimensi yang memerlukan pendekatan holistik dan kolaboratif. Sepanjang tahun 2024 hingga pertengahan 2025, berbagai langkah strategis telah dilakukan untuk menekan angka perkawinan anak, baik melalui kebijakan, edukasi, maupun penguatan peran masyarakat. Salah satu kebijakan yang menonjol adalah integrasi isu pencegahan perkawinan anak ke dalam program Pendidikan Keluarga dan Sekolah Ramah Anak, yang

bertujuan membangun kesadaran sejak dini di lingkungan sekolah dan keluarga.

Kampanye publik bertajuk “Anak Bukan Pengantin” telah digelar secara masif di berbagai kecamatan, melibatkan Forum Anak, tokoh agama, tokoh adat, dan organisasi kepemudaan. Kampanye ini tidak hanya menyoal anak-anak dan remaja, tetapi juga orang tua dan pemangku kepentingan lokal, dengan pesan utama bahwa anak berhak atas masa depan yang cerah, bukan pernikahan dini yang memutus rantai pendidikan dan perkembangan.

Selain kampanye, Kota Jambi juga telah mengembangkan Sistem Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dan mencegah praktik perkawinan anak di tingkat kelurahan. Melalui pelatihan dan pendampingan, kader PATBM dibekali pengetahuan tentang hak anak, mekanisme pelaporan, serta strategi advokasi lokal. Pendekatan ini terbukti efektif dalam membangun jejaring perlindungan yang responsif dan berbasis komunitas.

Data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam kasus perkawinan anak selama dua tahun terakhir. Hal ini menjadi indikator positif bahwa intervensi yang dilakukan mulai menunjukkan hasil, meskipun tantangan seperti norma budaya, tekanan ekonomi, dan minimnya akses informasi masih menjadi hambatan yang perlu diatasi secara berkelanjutan.

Pemerintah Kota Jambi juga menjalin kerja sama dengan lembaga peradilan agama untuk memperketat proses dispensasi nikah, memastikan

bahwa setiap permohonan ditinjau secara ketat dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Di sisi lain, Forum Anak Kota Jambi aktif menyuarakan penolakan terhadap perkawinan usia anak melalui berbagai media, termasuk podcast, media sosial, dan forum dialog anak.

Dengan komitmen yang kuat, sinergi antar lembaga, dan partisipasi aktif masyarakat, Kota Jambi terus memperkuat langkah-langkah pencegahan perkawinan usia anak sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Kota Jambi percaya bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh, belajar, dan bermimpi tanpa dibatasi oleh pernikahan dini yang merampas masa depan mereka.

Sebagai bagian dari penguatan ekosistem perlindungan anak, Pemerintah Kota Jambi juga mendorong keterlibatan aktif lembaga pendidikan dalam mencegah perkawinan usia anak melalui kurikulum yang responsif terhadap isu gender dan hak anak. Sekolah-sekolah di Kota Jambi mulai mengintegrasikan materi tentang kesehatan reproduksi, perencanaan masa depan, dan konsekuensi hukum perkawinan anak ke dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pembelajaran tematik. Guru dan tenaga kependidikan dilatih untuk menjadi agen perubahan yang mampu mendeteksi dini potensi risiko perkawinan anak di lingkungan sekolah. Upaya ini tidak hanya memperkuat literasi anak dan remaja tentang hak-hak mereka, tetapi juga membangun budaya sekolah yang mendukung tumbuh kembang anak secara aman, inklusif, dan bebas dari tekanan sosial yang mendorong pernikahan dini.

Tabel 5.1

Perkawinan Usia Anak di Kota Jambi menurut umur tahun 2024

No.	Umur Anak	Jumlah (anak)
1.	15 Tahun	1
2.	16 Tahun	2
3.	17 Tahun	8
4.	18 Tahun	25

Sumber : Pengadilan Agama Kota Jambi, 2025

B. PENGUATAN KAPASITAS LEMBAGA KONSULTASI PENYEDIA LAYANAN PENGASUHAN ANAK BAGI ORANG TUA/ KELUARGA

Dalam menghadapi kompleksitas tantangan pengasuhan anak di era modern, peran lembaga konsultasi menjadi semakin krusial sebagai garda terdepan dalam mendampingi keluarga. Pemerintah Kota Jambi menyadari bahwa pengasuhan anak bukan hanya tanggung jawab individu, melainkan bagian dari ekosistem sosial yang membutuhkan dukungan lintas sektor. Oleh karena itu, penguatan kapasitas lembaga konsultasi pengasuhan anak menjadi salah satu strategi utama dalam membangun sistem perlindungan anak yang holistik dan berkelanjutan.

Penguatan kapasitas ini dilakukan melalui berbagai pendekatan, mulai dari peningkatan kompetensi sumber daya manusia hingga pengembangan materi edukatif yang relevan dengan kebutuhan lokal. Tenaga konselor, fasilitator keluarga, dan pekerja sosial diberikan pelatihan secara berkala mengenai pendekatan pengasuhan berbasis hak anak, teknik komunikasi yang mendukung hubungan positif dalam keluarga, serta penanganan kasus

kekerasan dan pengabaian anak. Pelatihan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan teknis, tetapi juga membentuk sensitivitas sosial dan empati dalam menghadapi dinamika keluarga yang beragam.

Selain itu, lembaga konsultasi didorong untuk membangun kemitraan strategis dengan sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Kolaborasi ini memungkinkan terbentuknya sistem rujukan yang responsif, sehingga keluarga yang membutuhkan bantuan dapat segera terhubung dengan layanan yang sesuai. Integrasi antar sektor juga memperkuat efektivitas intervensi, karena pendekatan yang komprehensif lebih mampu menjawab akar permasalahan pengasuhan daripada solusi yang bersifat parsial.

Pendekatan berbasis komunitas menjadi elemen penting dalam strategi penguatan ini. Lembaga konsultasi tidak hanya beroperasi di ruang formal, tetapi juga aktif menjangkau masyarakat melalui kegiatan edukatif, diskusi kelompok, dan pendampingan langsung di lingkungan tempat tinggal keluarga. Dengan melibatkan tokoh masyarakat, kader lokal, dan organisasi berbasis komunitas, proses pendampingan menjadi lebih kontekstual dan diterima oleh masyarakat. Hal ini juga membuka ruang partisipasi yang lebih luas, di mana keluarga tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga aktor aktif dalam membentuk budaya pengasuhan yang sehat.

Melalui berbagai upaya tersebut, lembaga konsultasi diharapkan mampu menjadi mitra strategis dalam mendampingi orang tua dan keluarga menghadapi tantangan pengasuhan. Lebih dari sekadar tempat konsultasi, lembaga-lembaga ini menjadi ruang belajar, refleksi, dan penguatan kapasitas keluarga secara berkelanjutan. Dengan dukungan kebijakan yang

berpihak pada anak dan komitmen lintas sektor, penguatan kapasitas lembaga konsultasi menjadi fondasi penting dalam membangun Kota Jambi sebagai lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Sebagai bagian dari komitmen jangka panjang, Pemerintah Kota Jambi juga mendorong pelibatan aktif keluarga dalam proses perencanaan dan evaluasi layanan pengasuhan. Melalui forum-forum warga, lokakarya partisipatif, dan mekanisme umpan balik yang inklusif, suara orang tua dan anak menjadi bagian penting dalam merancang layanan yang benar-benar menjawab kebutuhan mereka. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap program pengasuhan, tetapi juga membangun kepercayaan antara lembaga penyedia layanan dan komunitas. Dengan menjadikan keluarga sebagai mitra sejajar, proses penguatan kapasitas lembaga konsultasi menjadi lebih berakar dan berkelanjutan dalam konteks sosial budaya lokal.

Tabel 5.2

Lembaga Layanan Konsultasi Keluarga Di Kota Jambi Tahun 2025

Nama Lembaga	Jumlah	Keterangan
LK3 SAMAWA	1	Dinas Sosial Kota Jambi
BKB	47	DPPKB Kota Jambi
BKR	21	DPPKB Kota Jambi
PPKS	11	DPPKB Kota Jambi
Pusaka Sakinah	3	KEMENAG Kota Jambi
PUSPAGA	1	DPMPPA Kota Jambi

Sumber: DPMPPA Kota Jambi, 2025



Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Dan Integratif (Paud-Hi)

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI) merupakan pendekatan strategis yang menempatkan anak sebagai subjek utama pembangunan, dengan memastikan bahwa seluruh aspek tumbuh kembangnya—fisik, kognitif, emosional, sosial, dan spiritual—terpenuhi secara terpadu. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pendidikan formal, tetapi juga mencakup layanan kesehatan dasar, pemenuhan gizi, pengasuhan yang berkualitas, perlindungan dari kekerasan, serta stimulasi yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Dalam konteks Kota Jambi sebagai Kota Layak Anak, PAUD-HI menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter sejak usia dini.

Implementasi PAUD-HI di Kota Jambi menunjukkan adanya komitmen lintas sektor yang semakin kuat. Pemerintah daerah, melalui dinas terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah mulai membangun sinergi dalam penyediaan layanan yang terintegrasi. Lembaga PAUD tidak lagi berdiri

sendiri sebagai penyedia pendidikan, tetapi menjadi pusat layanan anak usia dini yang melibatkan tenaga kesehatan, kader posyandu, pekerja sosial, dan pendidik dalam satu ekosistem pelayanan. Hal ini memungkinkan anak-anak mendapatkan layanan imunisasi, skrining tumbuh kembang, konseling gizi, serta edukasi pengasuhan bagi orang tua secara bersamaan di satu tempat.

Namun, pelaksanaan PAUD-HI di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu hambatan utama adalah belum meratanya pemahaman para pemangku kepentingan tentang konsep holistik dan integratif itu sendiri. Banyak lembaga PAUD yang masih beroperasi secara sektoral, tanpa koordinasi yang memadai dengan layanan kesehatan atau perlindungan anak. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam pendekatan PAUD-HI juga menjadi kendala. Guru PAUD, kader kesehatan, dan tenaga pendamping keluarga sering kali belum mendapatkan pelatihan yang cukup untuk memahami peran mereka dalam sistem layanan yang terintegrasi.

Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam mendukung PAUD-HI juga perlu terus ditingkatkan. Orang tua sebagai aktor utama dalam pengasuhan anak perlu diberikan ruang dan kesempatan untuk terlibat aktif dalam proses pendidikan dan layanan anak usia dini. Melalui forum-forum komunikasi seperti Kelompok Kerja PAUD-HI, pertemuan orang tua, dan kegiatan edukatif di tingkat kelurahan, masyarakat dapat menjadi mitra strategis dalam memastikan bahwa anak-anak mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kesadaran kolektif bahwa pengasuhan dan pendidikan anak usia dini adalah tanggung jawab bersama menjadi kunci keberhasilan pendekatan ini.

Pemerintah Kota Jambi juga perlu memperkuat regulasi dan kebijakan daerah yang mendukung PAUD-HI. Penyusunan Peraturan Wali Kota atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang standar layanan PAUD-HI, mekanisme koordinasi lintas sektor, serta alokasi anggaran yang memadai akan menjadi landasan penting dalam memperluas cakupan dan kualitas layanan. Selain itu, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan PAUD-HI berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, serta mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan anak.

Dengan pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif, PAUD-HI bukan hanya menjadi program pendidikan, tetapi juga strategi pembangunan manusia yang berkelanjutan. Anak-anak yang mendapatkan layanan PAUD-HI yang berkualitas akan tumbuh menjadi individu yang sehat, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kota Jambi, dengan segala potensi dan komitmennya, memiliki peluang besar untuk menjadi model pelaksanaan PAUD-HI yang berhasil di tingkat nasional. Melalui kerja sama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan, visi besar untuk mewujudkan generasi emas Indonesia dapat mulai dibangun dari langkah-langkah kecil yang dilakukan hari ini.

Tabel 5.3

Kemitraan PAUD HI Kota Jambi dengan Organisasi Perangkat Daerah
Pemerintah Kota Jambi Tahun 2024

NO	BENTUK KERJASAMA	KETERANGAN
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak		
1.	Gebyar PAUD di Kecamatan	Bunda PAUD
2.	Pelatihan Konvensi Hak Anak	Pelatihan ditujukan untuk guru PAUD
Dinas Kesehatan		
3.	Pemberian Vitamin dan Penimbangan pada anak	Posyandu
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
4.	Pembuatan Akte Kelahiran dan Kartu Identitas Anak	Inovasi Reaksi Cepat
Dinas Pendidikan		
5.	Pembina dan Pemberi izin PAUD HI	Leading sector
Kementrian Agama Wilayah Jambi		
6.	Forum komunikasi guru pendidikan agama islam	Kemitraan

Sumber : DPMPPA Kota Jambi, 2025

C. LEMBAGA PENGASUHAN ALTERNATIF

Dalam rangka mewujudkan Kota Jambi sebagai Kota Layak Anak, perhatian terhadap anak-anak yang berada di luar pengasuhan orang tua kandung menjadi salah satu prioritas utama. Anak-anak yang kehilangan pengasuhan karena berbagai faktor—seperti kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, atau kematian orang tua—memerlukan sistem perlindungan yang komprehensif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberadaan Lembaga Pengasuhan Alternatif (LPA) menjadi sangat krusial dalam menjamin hak-hak dasar anak tetap terpenuhi, termasuk hak atas kasih sayang, perlindungan, pendidikan, dan kehidupan yang layak.

Di Kota Jambi, LPA terdiri dari berbagai bentuk, seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), panti asuhan, rumah singgah, serta pengasuhan berbasis komunitas dan keluarga pengganti. Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) secara aktif melakukan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi terhadap lembaga-lembaga ini agar mampu memberikan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengasuhan berbasis hak anak.

Salah satu langkah strategis yang telah dilakukan adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia di LPA. Para pengasuh, pekerja sosial, dan relawan diberikan pelatihan secara berkala mengenai pola asuh positif, manajemen stres anak, pendampingan psikologis, serta pemahaman terhadap regulasi perlindungan anak. Hal ini bertujuan agar pengasuhan yang diberikan tidak hanya bersifat fisik dan administratif, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan emosional dan psikososial anak secara holistik.

Selain itu, Kota Jambi juga mendorong pendekatan pengasuhan berbasis keluarga sebagai alternatif utama. Program keluarga pengganti, seperti orang tua asuh dan pengasuhan dalam keluarga besar, mulai dikembangkan dengan dukungan regulasi dan insentif sosial. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam menjaga ikatan emosional anak, memperkuat identitas sosial mereka, dan mencegah dampak negatif dari institusionalisasi jangka panjang.

Dalam hal pengawasan dan evaluasi, Pemerintah Kota Jambi menerapkan sistem pelaporan berbasis indikator KLA yang mencakup aspek kelayakan fasilitas, kualitas layanan, partisipasi anak, serta keterlibatan masyarakat. Audit sosial dilakukan secara berkala untuk memastikan

transparansi dan akuntabilitas lembaga dalam menjalankan fungsi pengasuhan. Selain itu, mekanisme pengaduan dan pelaporan kekerasan terhadap anak juga diperkuat melalui kanal-kanal yang mudah diakses oleh masyarakat.

Kota Jambi juga menjalin kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga keagamaan, dan dunia usaha untuk mendukung keberlanjutan LPA. Bantuan dalam bentuk dana, fasilitas, dan program pendampingan menjadi bagian dari kolaborasi multipihak yang memperkuat ekosistem perlindungan anak di kota ini.

Dengan berbagai upaya tersebut, Kota Jambi menunjukkan komitmen nyata dalam memastikan bahwa setiap anak, termasuk mereka yang berada di luar pengasuhan orang tua kandung, tetap mendapatkan perlakuan yang adil, penuh kasih, dan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak. Lembaga Pengasuhan Alternatif bukan hanya menjadi tempat tinggal sementara, tetapi juga menjadi ruang tumbuh yang aman, mendidik, dan membentuk masa depan anak-anak yang lebih cerah.

Tabel 5.4

Lembaga Pengasuhan Alternatif di Kota Jambi Tahun 2024

No	Nama Lembaga	Jumlah
1.	LKSA	50
2.	Pesantren	20
3.	Pesantren Berbasis Madrasah	12
4.	Sekolah Berasrama	9

5.	Taman Penitipan Anak/ Tara	23
Jumlah		114

Sumber : DPMPPA Kota Jambi, 2025

Tabel 5.6

Kemitraan Lembaga Pengasuhan Alternatif dengan Perangkat Daerah
Pemerintah Kota Jambi Tahun 2024

No	Nama perangkat Daerah	Bentuk Kerjasama	Keterangan
1.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	memberikan ruang konseling tentang pola asuh anak yang baik	BKB, BKR, TPA, LKSA dan sekolah berasrama
2.	Dinas Sosial	sebagai instansi yang memiliki kewenangan pendirian ijin dan melakukan pengawasan dan koordinasi terkait dengan pelaksanaan dari lembaga layanan tersebut	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)
3.	Dinas Pendidikan	perijinan dan pengawasan serta koordinasi pelaksanaan kegiatan sekolah beasrama dan TPA	Sekolah berasrama dan Taman Penitipan Anak (TPA)
4.	Dinas Kesehatan	memberikan layanan kesehatan gratis bagi anak anak pada lembaga layanan pengasuhan alternatif melalui Puskesmas Ramah Anak	Puskesmas Ramah Anak
5.	Kementrian Agama Wilayah Jambi	pemberian ijin dan melakukan pengawasan dan koordinasi dengan pelaksanaan kegiatan pesantren	Pesantren
6.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	memberikan layanan informasi layak anak kepada lembaga pengasuhan alternatif dimaksud	Informasi Layak Anak

Sumber : DPMPPA Kota Jambi, 2025

D. INFRASTRUKTUR (SARANA DAN PRASARANA) RAMAH ANAK DI RUANG PUBLIK

Sebagai bagian dari komitmen menuju Kota Layak Anak, Pemerintah Kota Jambi terus melakukan pembenahan dan pengembangan infrastruktur publik yang ramah anak. Ruang publik bukan hanya menjadi tempat rekreasi, tetapi juga ruang belajar, ruang sosial, dan ruang aman bagi anak-anak untuk berekspresi, berinteraksi, dan tumbuh secara sehat. Oleh karena itu, desain dan fungsi ruang publik di Kota Jambi diarahkan untuk memenuhi prinsip inklusivitas, keamanan, kenyamanan, dan partisipasi anak.

Berbagai taman kota, alun-alun, dan fasilitas umum telah mengalami revitalisasi dengan pendekatan ramah anak. Taman-taman dilengkapi dengan area bermain yang aman, bebas dari potensi bahaya fisik, serta menggunakan material yang sesuai dengan standar keselamatan anak. Jalur pedestrian diperlebar dan diratakan untuk memudahkan akses anak-anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Penerangan yang cukup, rambu-rambu informatif, dan zona bebas kendaraan menjadi bagian dari desain yang mendukung mobilitas anak secara mandiri.

Selain itu, Pemerintah Kota Jambi juga membangun fasilitas sanitasi yang layak dan bersih di ruang publik, termasuk toilet anak dan ruang menyusui, sebagai bentuk dukungan terhadap kebutuhan dasar anak dan keluarga. Di beberapa titik strategis, tersedia ruang interaktif seperti perpustakaan mini, panggung ekspresi anak, dan area edukatif yang mendorong kreativitas serta pembelajaran informal.

Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur ramah anak dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi

masyarakat, dunia usaha, dan anak-anak itu sendiri. Melalui forum anak dan musrenbang anak, suara dan aspirasi anak menjadi bagian penting dalam perencanaan ruang publik. Hal ini mencerminkan pendekatan partisipatif yang menghargai anak sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek.

Pengawasan terhadap kualitas dan keberfungsian sarana prasarana ramah anak dilakukan secara berkala oleh Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Evaluasi dilakukan berdasarkan indikator KLA yang mencakup aspek aksesibilitas, keselamatan, keberlanjutan, dan keterlibatan anak. Pemerintah juga mendorong masyarakat untuk aktif menjaga dan memanfaatkan ruang publik secara bijak, sehingga tercipta lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh.

Dengan berbagai upaya tersebut, Kota Jambi menunjukkan keseriusan dalam membangun ekosistem kota yang ramah anak, di mana ruang publik menjadi simbol inklusi, perlindungan, dan penghargaan terhadap hak anak. Infrastruktur bukan hanya soal bangunan dan fasilitas, tetapi juga tentang nilai-nilai yang tertanam di dalamnya—nilai kasih, partisipasi, dan keberpihakan terhadap masa depan generasi muda.

Tabel 5.6

Taman Bermain Ramah Anak di Kota Jambi tahun 2024

No	RBA	Lokasi	Jumlah
1.	Tempat Wisata	Danau Sipin	1

No	RBA	Lokasi	Jumlah
2.	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kongkow, Taman Lingkungan Perumnas (Pln), Taman Jalan Perumnas Kotabaru, Pedestarian Taman Jomblo, Taman Jaksa 1 Dan Taman Jaksa 2, Taman Tugu PKK Thehok, Taman Arena Remaja, Taman Makalam, Taman Hutan Kota H.M Sabki	10
3.	Puskesmas dan Rumah Sakit	Puskesmas Pakuan Baru, Puskesmas Rawasari, Puskesmas Paal V, Puskesmas Paal X, Puskesmas Koni, Puskesmas Tahtul Yaman, Puskesmas Olak Kemang, Puskesmas Paal Merah I, Puskesmas Paal Merah II, Puskesmas Kebun Kopi, Puskesmas Putri Ayu, Puskesmas Simpang Iv Sipin, Puskesmas Simpang Kawat, Puskesmas Kenali Besar, Puskesmas Payo Selincah, Puskesmas Tanjung Pinag, Puskesmas Talang Banjar, Puskesmas Kebun Handil, Puskesmas Talang Bakung, Puskesmas Aurduri, Rumah Sakit Rs. Dr. Bratanata, Rs St Theresia, Rs. Ibu & Anak Annisa	23
4.	Mall Pelayanan Publik	Mall Pelayanan Publik	1
5.	Pemukiman	Taman Perumnas	1
6.	Kantor Pemerintah	Dukcapil, Kecamatan dalam Kota Jambi	12
7.	Bandara	Bandara Sulthan Thaha	1
8.	Dealer	Dealer Mobil Honda Jambi	1
9.	Alun-alun	Taman Jomblo	1
10.	PAUD	PAUD CBC Mawaddah Warrohmah	1

Sumber : DPMPPA Kota Jambi, 2025

Sebagai bagian dari pengembangan infrastruktur ramah anak, Pemerintah Kota Jambi juga memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan **Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)**. RBRA merupakan ruang publik yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan

bermain anak dengan memperhatikan aspek keselamatan, kenyamanan, partisipasi, dan inklusivitas. Ruang bermain bukan sekadar tempat hiburan, tetapi juga menjadi sarana penting dalam mendukung tumbuh kembang anak secara fisik, sosial, dan emosional.

Salah satu contoh nyata dari komitmen ini adalah **Taman Kongkow**, yang telah ditetapkan sebagai RBRA berstandar di Kota Jambi. Taman Kongkow dirancang dengan mengacu pada indikator nasional RBRA, yang mencakup aspek kelayakan fisik, keamanan alat permainan, aksesibilitas bagi anak berkebutuhan khusus, serta tersedianya informasi edukatif di area bermain. Area taman dilengkapi dengan lantai anti-slip, pagar pengaman, dan alat permainan yang sesuai dengan usia anak. Selain itu, tersedia fasilitas pendukung seperti toilet anak, tempat duduk untuk orang tua, dan ruang terbuka hijau yang bersih dan teduh.

Taman Kongkow juga menjadi contoh ruang publik yang mengintegrasikan prinsip partisipasi anak. Dalam proses revitalisasi taman, Pemerintah Kota Jambi melibatkan Forum Anak Kota Jambi untuk memberikan masukan terkait desain dan jenis permainan yang diinginkan. Hasilnya adalah ruang bermain yang tidak hanya aman dan nyaman, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi anak-anak sebagai pengguna utama.

Keberadaan RBRA seperti Taman Kongkow menunjukkan bahwa Kota Jambi tidak hanya membangun infrastruktur secara fisik, tetapi juga membangun budaya perlindungan dan penghargaan terhadap hak anak. Pemerintah terus mendorong agar lebih banyak ruang publik di berbagai

kecamatan dapat memenuhi standar RBRA, sehingga anak-anak di seluruh wilayah kota memiliki akses yang setara terhadap ruang bermain yang layak.

Tabel 5.7
Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) di Kota Jambi
yang telah terstandarisasi

No	RBRA	Jumlah SDM	Jumlah SDM Terlatih	Pengelola
1.	Tempat Kongkow Jl. Kopral Sardi RT 25, Kelurahan PAAI V, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi	7	2	Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

Sumber : DPMPPA Kota Jambi, 2025

Program Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah (RASS) merupakan salah satu inovasi penting dalam mewujudkan Kota Jambi sebagai Kota Layak Anak. Program ini dirancang untuk menjamin keselamatan anak-anak saat melakukan perjalanan menuju dan pulang dari sekolah, baik dengan berjalan kaki, bersepeda, maupun menggunakan transportasi umum. RASS tidak hanya berfokus pada aspek fisik seperti perbaikan trotoar, pemasangan rambu lalu lintas, dan penataan jalur pejalan kaki, tetapi juga menekankan pendekatan edukatif dan partisipatif yang melibatkan anak, orang tua, guru, serta masyarakat sekitar.

Pemerintah Kota Jambi, melalui kolaborasi lintas sektor, terus mendorong agar program ini diperluas ke seluruh kecamatan, sehingga setiap anak memiliki akses terhadap perjalanan yang aman dan nyaman. Lebih dari sekadar

program infrastruktur, RASS mencerminkan komitmen Kota Jambi dalam membangun ekosistem yang peduli terhadap hak dan perlindungan anak. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung mobilitas anak secara mandiri dan selamat, kota ini tidak hanya melindungi generasi muda dari risiko kecelakaan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan kesadaran sosial sejak dini. Program RASS menjadi bukti bahwa pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan harus dimulai dari langkah-langkah kecil yang berdampak besar bagi masa depan anak-anak.

Tabel 5.8

Program Rute Aman Selamat Ke Dan Dari Sekolah (RASS) di Kota Jambi

No	Program	Jumlah SDM
1.	Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Dinas Perhubungan Kota Jambi
2.	Bus Sekolah	Dinas Perhubungan Kota Jambi
3.	Aman Sekolah	Dinas Perhubungan Kota Jambi
4.	Polisi Sahabat Anak	Polresta Jambi
5.	Polisi Cilik	Polresta Jambi
6.	Patroli Keamanan Sekolah	Polresta Jambi
7.	Sosialisasi Safety Riding	Polresta Jambi

Sumber : DPMPPA Kota Jambi, 2025

BAB VI

KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Kesehatan anak bukan sekadar indikator statistik, melainkan cerminan dari kualitas hidup dan masa depan suatu daerah. Kota Jambi memahami bahwa pemenuhan hak anak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan adalah fondasi utama dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Jambi menempatkan klaster ini sebagai prioritas dalam pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada hak anak.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Jambi menunjukkan kemajuan signifikan dalam peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan anak. Salah satu capaian yang patut diapresiasi adalah penurunan angka stunting yang konsisten dari tahun ke tahun. Melalui pendekatan multisektor dan intervensi terintegrasi, seperti Gerakan Serentak Penurunan Stunting, Kelas Ibu Balita, dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan lokal, Kota Jambi berhasil menurunkan prevalensi stunting hingga di bawah angka nasional. Program ini tidak hanya melibatkan Dinas Kesehatan, tetapi juga Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas PMPPA, DPPKB dan kader-kader posyandu yang menjadi ujung tombak edukasi di masyarakat.

Selain itu, Kota Jambi telah mengembangkan Puskesmas Ramah Anak sebagai bentuk inovasi pelayanan kesehatan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan anak. Puskesmas ini tidak hanya menyediakan layanan medis, tetapi juga ruang bermain, konseling psikologis, edukasi gizi, dan

layanan tumbuh kembang anak. Tenaga kesehatan dilatih untuk memahami prinsip-prinsip perlindungan anak, sehingga interaksi dengan anak dilakukan secara empatik dan mendidik. Hal ini menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk mengakses layanan kesehatan tanpa rasa takut atau tertekan.

Cakupan imunisasi dasar lengkap juga mengalami peningkatan yang signifikan. Melalui kampanye imunisasi terpadu dan kolaborasi dengan sekolah-sekolah, cakupan imunisasi anak usia 0–5 tahun mencapai lebih dari 95%. Pemerintah Kota Jambi juga aktif dalam pelaksanaan program Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) dan Sub PIN Polio, sebagai bentuk komitmen terhadap eliminasi penyakit menular yang mengancam tumbuh kembang anak.

Di sisi kesejahteraan, perhatian terhadap anak-anak dari kelompok rentan menjadi bagian integral dari kebijakan daerah. Anak-anak dari keluarga miskin, anak disabilitas, anak korban kekerasan, dan anak yang kehilangan pengasuhan orang tua mendapatkan perlindungan melalui program bantuan sosial, rehabilitasi, dan layanan konseling. Program PITA MOLIN (Pendidikan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Perundungan) menjadi salah satu inovasi lokal yang efektif dalam membangun kesadaran anak dan lingkungan sekolah terhadap isu kekerasan, perundungan, dan kesehatan mental.

Pemerintah Kota Jambi juga mendorong partisipasi anak dalam menyuarakan kebutuhan mereka terkait kesehatan dan kesejahteraan. Forum Anak Bumi Angso Duo secara aktif terlibat dalam kampanye kesehatan, edukasi gizi, dan penyusunan rekomendasi kebijakan yang

ramah anak. Keterlibatan anak dalam proses pembangunan ini menjadi bukti bahwa Kota Jambi tidak hanya membangun untuk anak, tetapi juga bersama anak.

Secara keseluruhan, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan di Kota Jambi menunjukkan bahwa pendekatan yang holistik, inklusif, dan berbasis hak anak mampu menghasilkan dampak nyata bagi kehidupan anak-anak. Kota Jambi tidak hanya berupaya memenuhi indikator teknis, tetapi juga membangun ekosistem yang sehat, aman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Kota Jambi terus melangkah menuju visi besar: menjadi kota yang benar-benar layak bagi setiap anak.

A. PERSALINAN DI FASILITAS KESEHATAN

Persalinan yang aman dan bermartabat merupakan hak dasar setiap ibu dan anak. Kota Jambi menempatkan isu ini sebagai prioritas dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, sekaligus sebagai indikator penting dalam penilaian Kota Layak Anak. Pemerintah Kota Jambi terus mendorong peningkatan angka persalinan di fasilitas kesehatan sebagai bagian dari strategi menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta memastikan setiap anak lahir dalam kondisi yang sehat dan terlindungi.

Dalam beberapa tahun terakhir, capaian persalinan di fasilitas kesehatan menunjukkan tren yang sangat positif. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Jambi, lebih dari 98% persalinan telah dilakukan di fasilitas kesehatan, baik di Puskesmas, rumah sakit, maupun klinik bersalin. Capaian ini tidak lepas dari upaya intensif pemerintah dalam memperluas akses

layanan kesehatan, meningkatkan kualitas tenaga medis, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan formal.

Puskesmas di Kota Jambi telah bertransformasi menjadi Puskesmas Ramah Anak dan Ramah Ibu, dengan fasilitas ruang bersalin yang memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan. Tenaga kesehatan, khususnya bidan dan perawat, dibekali pelatihan tentang pelayanan berbasis hak anak dan hak reproduksi perempuan. Pendekatan ini memastikan bahwa proses persalinan tidak hanya aman secara medis, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis dan sosial ibu serta bayi yang dilahirkan.

Selain itu, program Kelas Ibu Hamil yang rutin dilaksanakan di seluruh kelurahan menjadi wadah edukasi dan persiapan mental bagi calon ibu. Dalam kelas ini, ibu hamil mendapatkan informasi tentang tanda bahaya kehamilan, pentingnya persalinan di fasilitas kesehatan, teknik relaksasi, serta hak-hak anak sejak dalam kandungan. Forum ini juga menjadi ruang dialog antara tenaga kesehatan dan masyarakat, sehingga tercipta hubungan yang lebih humanis dan saling percaya.

Untuk menjangkau wilayah dengan akses terbatas, Pemerintah Kota Jambi mengembangkan sistem jemput bola melalui program Mobil Sehat dan Bidan Keliling, yang memastikan ibu hamil mendapatkan pemeriksaan rutin dan diarahkan untuk bersalin di fasilitas kesehatan. Kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan kader posyandu juga menjadi kunci dalam mengubah pola pikir tradisional yang sebelumnya lebih memilih persalinan di rumah.

Tidak kalah penting, sistem rujukan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal (PONEK) di rumah sakit rujukan telah diperkuat, sehingga kasus-kasus persalinan berisiko tinggi dapat ditangani dengan cepat dan tepat.

Pemerintah juga menyediakan jaminan pembiayaan persalinan melalui skema JKN dan bantuan sosial daerah, agar tidak ada ibu yang terhalang untuk melahirkan di fasilitas kesehatan karena alasan ekonomi.

Dengan pendekatan yang komprehensif, Kota Jambi membuktikan bahwa persalinan di fasilitas kesehatan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal kepercayaan, edukasi, dan keberpihakan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Setiap kelahiran yang terjadi di fasilitas kesehatan adalah langkah awal menuju kehidupan anak yang sehat, aman, dan bermartabat—sebuah fondasi penting dalam mewujudkan Kota Layak Anak yang sesungguhnya.

Tabel 6.1

Persentase Balita Kota Jambi yang Mempunyai Buku KIA/KMS atau Kartu Berobat/Dokumen Lain yang Tertulis Tanggal Imunisasi Tahun 2024

No	Daerah	Ya, Dapat ditunjukkan	Ya, Tidak dapat ditunjukkan	Total
1.	Kota Jambi	54.49	27.41	81
2.	Provinsi Jambi	40.89	47.21	88

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi, 2024

Tabel 6.2

Persentase Perempuan Kota Jambi Pernah Kawin Berumur 15–49 Tahun yang Pernah Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) dalam 2 Tahun Terakhir Tahun 2024

No	Daerah	RS Pemerintah/ swasta	Praktek Tenaga Kesehatan
1.	Kota Jambi	53.65	25.54
2.	Provinsi Jambi	35.51	48.19

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi, 2024

Kematian ibu melahirkan (AKI) dan kematian bayi (AKB) merupakan dua indikator paling sensitif dalam menilai kualitas sistem kesehatan suatu daerah. Keduanya saling berkaitan erat, karena kondisi kesehatan ibu selama kehamilan, proses persalinan, dan masa nifas sangat menentukan peluang hidup bayi yang dilahirkan. Di Kota Jambi, perhatian terhadap isu ini menjadi bagian integral dari strategi pembangunan kesehatan dasar yang berorientasi pada hak anak dan perempuan.

Berdasarkan data terbaru dari Provinsi Jambi, Angka Kematian Ibu (AKI) tercatat sebesar 177 kematian per 100.000 kelahiran hidup, sedikit lebih rendah dari rata-rata nasional yang berada di angka 189. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam akses layanan kesehatan maternal, peningkatan kualitas tenaga medis, serta edukasi yang lebih baik kepada ibu hamil. Namun, angka ini tetap menjadi pengingat bahwa setiap kematian ibu adalah tragedi yang dapat dicegah, dan bahwa sistem kesehatan harus terus ditingkatkan.

Keterkaitan antara AKI dan AKB sangat jelas: ibu yang mengalami perdarahan, infeksi, atau hipertensi saat melahirkan berisiko tinggi kehilangan bayinya, baik karena prematuritas, asfiksia, atau infeksi neonatal. Sebaliknya, bayi yang lahir dengan berat badan rendah atau kondisi gawat janin sering kali menjadi pemicu komplikasi pada ibupendekatan yang terintegrasi antara kesehatan ibu dan anak menjadi kunci utama dalam menurunkan kedua angka ini secara bersamaan.

Dengan terus memperkuat layanan kesehatan maternal dan neonatal, serta memastikan bahwa setiap ibu dan bayi mendapatkan haknya atas pelayanan yang bermutu dan manusiawi, Kota Jambi melangkah lebih dekat

menuju cita-cita besar: menjadikan setiap kelahiran sebagai awal kehidupan yang sehat, aman, dan penuh harapan.

Tabel 6.3

Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kota Jambi tahun 2024

No	Indikator	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Angka Kematian Ibu Melahirkan	-		
2.	Angka Kematian Bayi	25	12	37

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi, 2024

Tabel 6.4

Jumlah Anak yang mendapatkan imunisasi lengkap di Kota Jambi tahun 2024

No	Indikator	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Imunisasi lengkap	4.509	4.363	8.872

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2025

Imunisasi merupakan salah satu intervensi kesehatan masyarakat yang paling efektif dalam mencegah penyakit menular dan melindungi anak dari risiko kematian dini. Di Kota Jambi, komitmen terhadap pemenuhan hak anak atas kesehatan diwujudkan melalui pelaksanaan program imunisasi dasar lengkap dan lanjutan yang menjangkau seluruh anak usia 0–7 tahun. Pemerintah Kota Jambi secara konsisten memperluas cakupan imunisasi melalui pendekatan promotif, preventif, dan kolaboratif lintas sektor.

Pada tahun 2025, Kota Jambi menargetkan cakupan imunisasi dasar lengkap mencapai 95%. Cakupan ini mencakup vaksinasi terhadap penyakit seperti hepatitis B, polio, campak-rubella, difteri, pertusis, tetanus, dan pneumonia. Pelaksanaan imunisasi dilakukan secara terintegrasi melalui Puskesmas, Posyandu, sekolah, dan layanan keliling, dengan dukungan penuh dari tenaga kesehatan, kader, serta Forum Anak Bumi Angso Duo yang turut aktif dalam kampanye edukatif.

Salah satu langkah strategis yang diambil adalah pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio Tahap 2, sebagai respons terhadap potensi penyebaran virus polio tipe 1 dan 2. Program ini dilaksanakan dalam dua putaran, masing-masing selama satu minggu, ditambah lima hari sweeping untuk menjangkau anak-anak yang belum terimunisasi. Setiap anak menerima dua dosis vaksin polio oral, tanpa memandang status imunisasi sebelumnya, sebagai upaya membentuk herd immunity dan mempertahankan status bebas polio di Kota Jambi.

Pemerintah juga memastikan bahwa imunisasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga inklusif dan ramah anak. Di beberapa Puskesmas, ruang imunisasi didesain dengan suasana menyenangkan, dilengkapi dengan permainan edukatif dan pendampingan psikologis agar anak merasa nyaman. Tenaga kesehatan dilatih untuk memberikan pelayanan dengan pendekatan empatik, sehingga proses imunisasi menjadi pengalaman yang positif bagi anak dan orang tua.

Selain imunisasi dasar, Kota Jambi juga mendorong pemberian imunisasi lanjutan seperti vaksin HPV untuk anak perempuan usia sekolah, sebagai bagian dari upaya pencegahan kanker serviks sejak dini. Program

ini dilaksanakan melalui kerja sama antara Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, dengan pendekatan edukatif yang melibatkan guru dan orang tua.

Capaian imunisasi lengkap di Kota Jambi tidak hanya mencerminkan keberhasilan teknis, tetapi juga menunjukkan bahwa hak anak atas perlindungan kesehatan telah menjadi bagian dari budaya pelayanan publik. Dengan cakupan yang terus meningkat dan pendekatan yang semakin inklusif, Kota Jambi membuktikan bahwa imunisasi bukan sekadar kewajiban, melainkan bentuk nyata dari kasih sayang dan perlindungan terhadap generasi masa depan.

B. STATUS GIZI BALITA

Kesehatan dan gizi balita merupakan fondasi utama dalam membentuk generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan produktif. Di Kota Jambi, perhatian terhadap status gizi anak usia dini menjadi prioritas strategis dalam pembangunan berkelanjutan, sejalan dengan komitmen nasional untuk menurunkan angka stunting dan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pemerintah Kota Jambi tidak hanya menjalankan program teknis, tetapi juga membangun ekosistem yang mendukung tumbuh kembang anak secara holistik.

Pada tahun 2025, sebanyak 285 balita berisiko stunting menerima bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) melalui program Kampung Bahagia, yang merupakan bagian dari aksi 100 hari kerja kepala daerah. PMT disalurkan dalam empat tahap sepanjang tahun, mencakup distribusi makanan bergizi seperti beras, susu, dan telur. Program ini dirancang untuk

menjangkau keluarga yang kesulitan mengakses sumber pangan bergizi, sekaligus memberikan edukasi tentang pola makan sehat dan pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak.

Selain PMT, Kota Jambi juga melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menasar kelompok prioritas 3B: ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (balita di bawah dua tahun). Program ini dijalankan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai kecamatan. MBG tidak hanya berfungsi sebagai intervensi gizi, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak masa kehamilan hingga usia dua tahun, yang dikenal sebagai 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Dalam kunjungan kerja Wakil Menteri BKKBN ke Kota Jambi, perhatian khusus diberikan kepada ibu hamil yang mengalami Kurang Energi Kronis (KEK) dan balita dengan status gizi kurang. Pemerintah pusat dan daerah bersinergi untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi, layanan kesehatan, dan edukasi tumbuh kembang yang memadai. Bahkan, dalam beberapa kasus, bantuan makanan bergizi diserahkan langsung kepada keluarga yang membutuhkan, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pemenuhan hak anak atas kesehatan. Program-program ini tidak berdiri sendiri. Mereka didukung oleh edukasi kepada keluarga mengenai pentingnya gizi seimbang, jarak kelahiran yang ideal, dan pemantauan tumbuh kembang anak secara berkala.

Pemerintah Kota Jambi juga mengintegrasikan pendekatan digital dalam pemantauan status gizi balita, melalui aplikasi pencatatan tumbuh kembang dan sistem pelaporan berbasis data. Hal ini memungkinkan

identifikasi dini terhadap kasus gizi buruk dan stunting, serta mempercepat respons intervensi. Kolaborasi dengan sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil turut memperkuat ekosistem pemenuhan gizi anak.

Pemerintah Kota Jambi menyadari bahwa status gizi balita sangat erat kaitannya dengan prevalensi **stunting**, yaitu kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis yang terjadi sejak masa kehamilan hingga usia dua tahun. Stunting tidak hanya berdampak pada tinggi badan anak, tetapi juga memengaruhi perkembangan otak, kemampuan belajar, dan produktivitas di masa dewasa. Oleh karena itu, peningkatan status gizi balita menjadi strategi utama dalam menurunkan angka stunting secara berkelanjutan.

Target penurunan stunting di Kota Jambi tahun 2025 ditetapkan sebesar 8%, dengan fokus pada wilayah-wilayah yang memiliki prevalensi tinggi dan keterbatasan akses layanan kesehatan. Pemerintah juga menggalang partisipasi aktif masyarakat melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), yang telah menunjukkan hasil positif dalam peningkatan status gizi ibu hamil dan balita. Salah satu contoh nyata adalah peningkatan lingkaran lengan atas ibu hamil dari 22 cm menjadi 28 cm setelah dua bulan intervensi gizi intensif.

Dengan sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat, Kota Jambi terus memperkuat ekosistem pencegahan stunting yang berbasis data, responsif, dan berkelanjutan. Status gizi balita bukan hanya cerminan dari pelayanan kesehatan, tetapi juga wujud nyata dari kepedulian kolektif terhadap masa depan anak-anak Jambi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Sebagai bagian dari penguatan komitmen bersama, Pemerintah Kota Jambi bersama seluruh pemangku kepentingan telah menandatangani Pernyataan Aksi Konvergensi Stunting dalam Rapat Koordinasi TP3S tahun 2025. Forum ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan langkah operasional lintas sektor, mulai dari perangkat daerah, fasilitas layanan kesehatan, hingga kader dan penyuluh KB di tingkat kecamatan. Dalam forum tersebut, Wakil Wali Kota Jambi menegaskan bahwa data faktual dari lapangan menjadi dasar utama dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Pendekatan berbasis bukti ini memperkuat efektivitas intervensi gizi dan pencegahan stunting, serta memastikan bahwa setiap anak di Kota Jambi tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung perkembangan optimalnya.

Tabel 6.5

Jumlah kasus Stunting di Kota Jambi tahun 2024

No	Indikator	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Stunting	284	285	569

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2025

C. PEMBERIAN MAKAN PADA BAYI DAN ANAK (PMBA) USIA DI BAWAH 2 TAHUN

Pemberian makan pada bayi dan anak usia di bawah dua tahun merupakan fondasi utama dalam membentuk status gizi yang optimal dan mencegah terjadinya stunting. Di Kota Jambi, praktik PMBA menjadi fokus intervensi kesehatan masyarakat yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga

edukatif dan berbasis budaya lokal. Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Kesehatan dan DPPKB terus memperkuat kapasitas keluarga dalam memahami dan menerapkan pola makan yang sesuai dengan tahapan tumbuh kembang anak.

PMBA dimulai dengan pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama, yang dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang bergizi, aman, dan sesuai kebutuhan usia. Pemerintah Kota Jambi mendorong pelaksanaan PMBA melalui berbagai kanal, termasuk Posyandu, Puskesmas, dan layanan kunjungan rumah oleh kader dan Tim Pendamping Keluarga (TPK). Edukasi tentang PMBA diberikan secara intensif kepada ibu dan keluarga, mencakup cara menyusui yang benar, frekuensi pemberian makan, keragaman zat gizi, serta tanda-tanda kecukupan nutrisi.

Pada tahun 2025, Kota Jambi menargetkan peningkatan praktik PMBA yang sesuai standar WHO dan Kementerian Kesehatan RI, dengan fokus pada bayi usia 6–23 bulan. Program ini terintegrasi dengan kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), yang tidak hanya memberikan asupan gizi, tetapi juga menjadi sarana edukasi langsung kepada orang tua tentang pentingnya pemberian makan yang tepat waktu, cukup jumlah, dan berkualitas.

Dalam pelaksanaannya, PMBA juga dikaitkan erat dengan upaya pencegahan stunting. Studi di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa riwayat pemberian makan yang tidak sesuai, seperti pemberian MP-ASI terlalu dini atau kurangnya keragaman makanan, berkontribusi terhadap tingginya prevalensi stunting pada balita. Oleh karena itu, Kota Jambi mengembangkan modul pelatihan PMBA untuk kader dan tenaga kesehatan,

berdasarkan Buku Saku PMBA dari Kementerian Kesehatan RI, yang menekankan prinsip-prinsip pemberian makan responsif, pemantauan pertumbuhan, dan pendekatan berbasis keluarga.

Pemerintah juga mengadopsi pendekatan budaya lokal dalam edukasi PMBA, seperti penggunaan bahan pangan tradisional yang kaya gizi, dan melibatkan tokoh masyarakat serta ibu-ibu PKK sebagai agen perubahan. Di beberapa kelurahan, kegiatan memasak bersama dan kelas gizi menjadi sarana efektif untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan ibu dalam menyiapkan makanan sehat bagi bayi dan anak.

Dengan pendekatan yang terintegrasi, edukatif, dan berbasis komunitas, Kota Jambi menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan bahwa setiap anak usia di bawah dua tahun mendapatkan asupan gizi yang optimal melalui praktik PMBA yang benar. Upaya ini bukan hanya tentang memberi makan, tetapi tentang membangun masa depan anak-anak Jambi yang sehat, kuat, dan bebas dari ancaman stunting.

Tabel 6.6

Persentase Penduduk Berumur 0–23 Bulan (Baduta) yang Pernah Diberi ASI dan Rata-Rata Lama Pemberian ASI Menurut Karakteristik di Kota Jambi tahun 2024

No	Indikator	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Persentase Penduduk Berumur 0–23 Bulan (Baduta) yang Pernah Diberi ASI	88.74 %	100 %
2.	Rata-Rata Lama Pemberian ASI (bulan)	8.51 bulan	14.19 bulan

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Jambi, 2024

D. FASILITAS KESEHATAN DENGAN PELAYANAN RAMAH ANAK

Pelayanan kesehatan yang ramah anak bukan sekadar soal infrastruktur, tetapi tentang bagaimana sistem kesehatan mampu memahami, menghormati, dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap proses pelayanan. Di Kota Jambi, transformasi fasilitas kesehatan menuju pelayanan yang ramah anak menjadi salah satu prioritas utama dalam mewujudkan Kota Layak Anak. Pemerintah Kota Jambi menyadari bahwa anak bukan hanya objek pelayanan, tetapi subjek yang memiliki hak untuk merasa aman, nyaman, dan dihargai.

Sejak tahun 2023, seluruh Puskesmas di Kota Jambi mulai menerapkan prinsip Pelayanan Ramah Anak, yang mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial. Ruang tunggu dan ruang pemeriksaan didesain dengan warna-warna ceria, dilengkapi dengan sudut bermain, buku cerita, dan media edukatif yang sesuai usia. Tenaga kesehatan dilatih untuk berinteraksi dengan anak secara empatik, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta menghindari tindakan yang menimbulkan ketakutan atau trauma.

Pemerintah Kota Jambi juga mendorong fasilitas kesehatan tingkat pertama (Faskes I) untuk mengadopsi standar pelayanan ramah anak, termasuk penyediaan ruang laktasi, ruang konseling anak dan remaja, serta layanan tumbuh kembang yang terintegrasi. Dalam perayaan Hari Anak Nasional 2025, Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, MKM, menegaskan bahwa pelayanan kesehatan ramah anak adalah bagian dari komitmen daerah dalam membangun generasi yang sehat dan bahagia.

Pelayanan ramah anak juga mencakup aspek perlindungan. Di beberapa Puskesmas, tersedia layanan konseling bagi anak korban kekerasan, serta mekanisme rujukan ke unit layanan terpadu (ULT) dan rumah aman. Tenaga kesehatan bekerja sama dengan Dinas PPPA dan kepolisian untuk memastikan bahwa anak-anak yang mengalami kekerasan mendapatkan penanganan yang cepat, tepat, dan tidak berulang.

Selain itu, Kota Jambi mengembangkan Puskesmas Ramah Anak Digital, yang memungkinkan pencatatan tumbuh kembang anak secara elektronik, pemantauan imunisasi, dan pengingat jadwal kunjungan. Sistem ini memudahkan orang tua dan tenaga kesehatan dalam memastikan bahwa anak mendapatkan layanan sesuai tahapan usia dan kebutuhan kesehatannya.

Keterlibatan anak dalam proses pelayanan juga menjadi perhatian. Forum Anak Bumi Angso Duo secara aktif memberikan masukan terhadap desain ruang pelayanan, jenis informasi yang dibutuhkan anak, serta cara komunikasi yang lebih bersahabat. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan ramah anak bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang mendengar dan melibatkan.

Dengan pendekatan yang menyeluruh, Kota Jambi membuktikan bahwa pelayanan kesehatan ramah anak adalah investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia. Fasilitas kesehatan yang ramah anak bukan hanya menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi anak, tetapi juga membangun kepercayaan, rasa aman, dan semangat hidup sehat sejak dini.

Tabel 6.7

Puskesmas Ramah Anak di Kota Jambi Yang telah terakreditasi

No	Puskesmas	Status Akreditasi
1.	Tanjung Pinang	Paripurna
2.	Pakuan Baru	Paripurna
3.	Paal V	Paripurna
4.	Kenali Besar	Utama
5.	KONI	Utama
6.	Olak Kemang	Paripurna
7.	Talang Bakung	Paripurna
8.	Kebon Kopi	Paripurna
9.	Simpang Kawat	Paripurna
10.	Talang Banjar	Paripurna
11.	Aur Duri	Paripurna
12.	Rawasari	Paripurna
13.	Putri Ayu	Utama
14.	Simpang IV Sipin	Paripurna
15.	Paal Merah I	Paripurna
16.	Paal Merah II	Utama
17.	Payo Selincah	Paripurna
18.	Paal X	Utama

Sumber : Sinas Kesehatan Kota Jambi, 2024

E. LINGKUNGAN SEHAT (AKSES AIR MINUM DAN SANITASI YANG LAYAK)

Pemerintah Kota Jambi terus berupaya menciptakan lingkungan yang sehat dan ramah anak melalui peningkatan akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi yang layak. Upaya ini sejalan dengan komitmen nasional dalam mencapai target SDGs, khususnya pada poin 6: Clean Water and Sanitation for All.

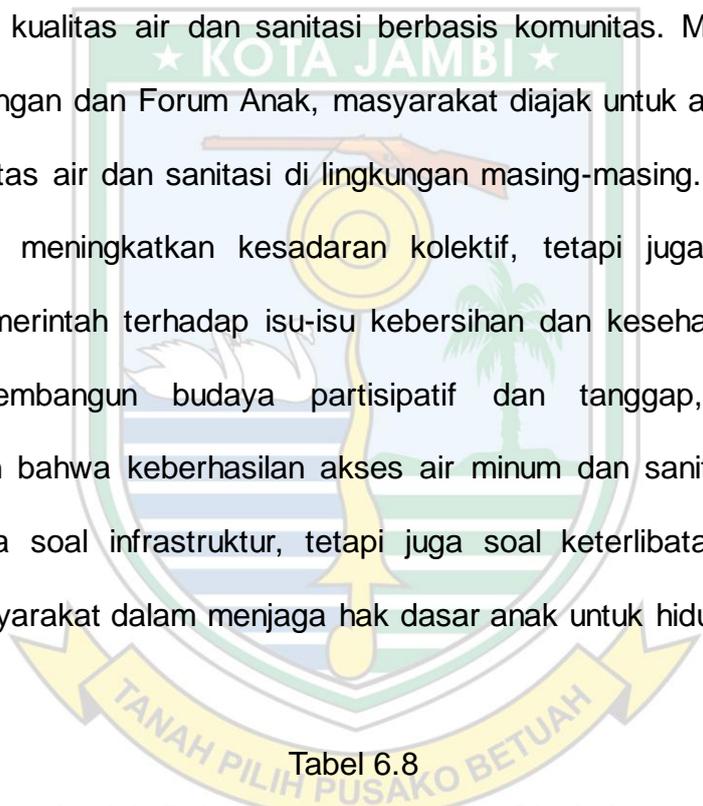
Pada tahun 2025, capaian akses air minum layak di Kota Jambi telah mencapai 98,7%, dengan perluasan jaringan perpipaan PDAM dan program Air Bersih Masuk Sekolah yang menjamin tersedianya air minum aman di seluruh satuan pendidikan. Program ini tidak hanya menyediakan fasilitas, tetapi juga mengedukasi anak-anak tentang pentingnya konsumsi air bersih dan menjaga kebersihan lingkungan.

Sementara itu, akses terhadap sanitasi layak telah meningkat menjadi 96,2%, berkat intervensi program Jambi Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan pembangunan toilet sehat di kawasan padat penduduk. Pemerintah juga menggandeng masyarakat melalui pendekatan Community-Led Total Sanitation (CLTS) untuk mendorong perubahan perilaku secara berkelanjutan.

Seluruh Puskesmas dan sekolah di Kota Jambi kini telah memiliki fasilitas sanitasi yang ramah anak, termasuk toilet terpisah untuk laki-laki dan perempuan, wastafel dengan akses mudah, serta sistem pembuangan limbah yang aman. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa Kota Jambi tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memperhatikan kenyamanan dan keamanan anak dalam mengaksesnya.

Selain itu, edukasi tentang kebersihan diri dan lingkungan terus digalakkan melalui kegiatan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) yang rutin dilakukan di sekolah dan posyandu. Kegiatan ini terbukti efektif dalam menurunkan angka penyakit berbasis lingkungan seperti diare dan infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) pada anak.

Sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan sehat yang berkelanjutan, Pemerintah Kota Jambi juga mengembangkan sistem pemantauan kualitas air dan sanitasi berbasis komunitas. Melalui pelibatan kader lingkungan dan Forum Anak, masyarakat diajak untuk aktif melaporkan kondisi fasilitas air dan sanitasi di lingkungan masing-masing. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran kolektif, tetapi juga mempercepat respons pemerintah terhadap isu-isu kebersihan dan kesehatan lingkungan. Dengan membangun budaya partisipatif dan tanggap, Kota Jambi menunjukkan bahwa keberhasilan akses air minum dan sanitasi yang layak bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dalam menjaga hak dasar anak untuk hidup sehat.



Tabel 6.8
Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan
Menurut Kecamatan di Kota Jambi, 2024

No	Kecamatan	Jumlah Pelanggan	Air yang disalurkan (m3)
1.	Kota Baru	19.926	330.260
2.	Alam Barajo	19.736	311.338

No	Kecamatan	Jumlah Pelanggan	Air yang disalurkan (m3)
3.	Jambi Selatan	7.530	120.550
4.	Paal Merah	7.515	105.950
5.	Jelutung	12.257	208.527
6.	Pasar Jambi	3.496	67.049
7.	Telanaipura	10.304	238.682
8.	Danau Sipin	8.284	162.257
9.	Danau Teluk	2.357	42.908
10.	Pelayangan	1.923	30.952
11.	Jambi Timur	10.685	163.050
Kota Jambi		104.013	1.781.523

Sumber : Kota Jambi dalam Angka, 2025

F. KAWASAN TANPA ROKOK

Sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan hak anak atas kesehatan dan lingkungan yang bersih, Pemerintah Kota Jambi telah menetapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan larangan terhadap iklan, promosi, serta sponsor rokok. Kebijakan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, yang mengatur larangan merokok di tempat umum, serta pembatasan iklan dan promosi rokok. Di tingkat daerah, Kota Jambi telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang mengatur

pelarangan merokok di tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, tempat bermain anak, angkutan umum, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana olahraga.

Implementasi KTR di Kota Jambi dilakukan secara bertahap dan konsisten. Penandaan kawasan bebas rokok telah dilakukan di berbagai titik strategis, termasuk sekolah, taman kota, dan fasilitas umum lainnya. Pemerintah daerah melalui Satpol PP dan Dinas Kesehatan secara rutin melakukan pengawasan dan penegakan aturan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan bebas rokok.

Forum Anak Kota Jambi turut mengambil peran aktif dalam mendukung kebijakan ini. Melalui berbagai kegiatan kampanye kreatif seperti flashmob, pembuatan konten digital, dan dialog publik, anak-anak menyuarakan penolakan terhadap rokok dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang sehat dan ramah anak. Keterlibatan anak dalam advokasi ini menjadi bukti bahwa mereka bukan hanya objek perlindungan, tetapi juga subjek yang mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah.

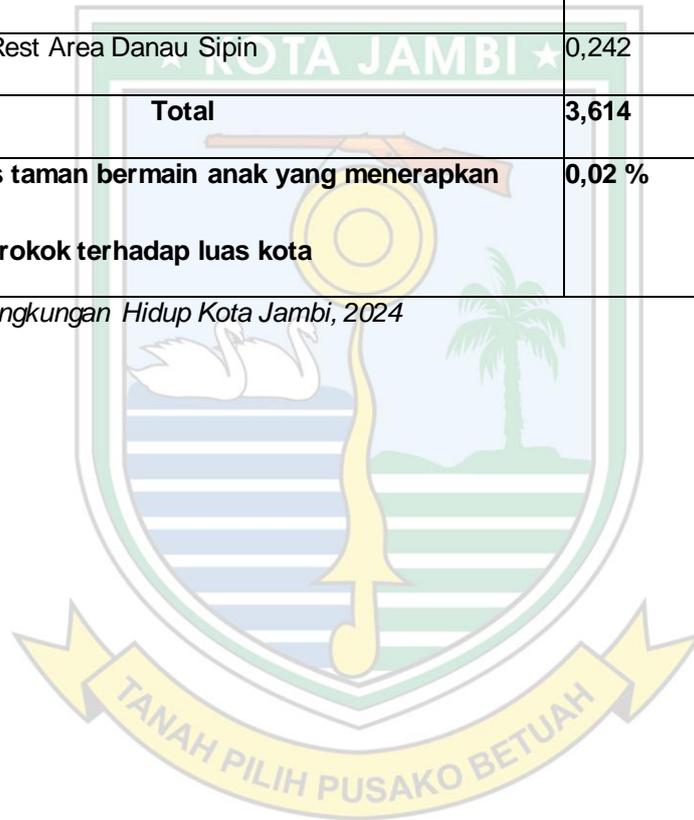
Dampak dari kebijakan KTR dan larangan IPS rokok mulai terlihat secara nyata. Terjadi penurunan jumlah pelanggaran di area publik, khususnya di lingkungan sekolah dan fasilitas umum. Kesadaran masyarakat, terutama orang tua dan guru, terhadap bahaya rokok bagi anak semakin meningkat. Atas komitmen ini, Kota Jambi mendapat apresiasi dari Kementerian Kesehatan sebagai salah satu daerah yang konsisten dalam pengendalian tembakau dan perlindungan anak dari bahaya rokok.

Tabel 6.9

Persentase Taman Bermain yang Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok
di Kota Jambi

No	Taman	Luas (HA)
Kota Jambi		17.552, 83
1.	Taman Arena Remaja	2,222
2.	Taman Kongkow	1,127
3.	Taman Perumnas	0,023
4.	Taman Rest Area Danau Sipin	0,242
Total		3,614
Persentase luas taman bermain anak yang menerapkan kawasan tanpa rokok terhadap luas kota		0,02 %

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2024



BAB VII

PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan Kota Layak Anak, dan Kota Jambi terus menunjukkan komitmennya dalam menyediakan akses pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan ramah anak. Pemerintah Kota Jambi telah mengintegrasikan prinsip-prinsip hak anak ke dalam kebijakan pendidikan, termasuk penyediaan fasilitas yang aman, bebas dari kekerasan, serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Program wajib belajar 12 tahun didorong secara aktif, dengan dukungan beasiswa bagi anak dari keluarga kurang mampu, serta penyediaan sekolah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus. Selain itu, pelatihan guru tentang pendidikan ramah anak dan pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah terus digalakkan.

Di luar jam sekolah, anak-anak Kota Jambi didorong untuk memanfaatkan waktu luang secara positif dan produktif. Pemerintah daerah bersama komunitas lokal menyediakan berbagai ruang ekspresi dan kegiatan kreatif, seperti taman baca, sanggar seni, klub olahraga, dan pelatihan keterampilan digital. Forum Anak Kota Jambi juga menjadi wadah penting bagi anak-anak untuk berkumpul, berdiskusi, dan mengembangkan potensi kepemimpinan mereka melalui kegiatan edukatif dan advokasi. Pemanfaatan waktu luang ini tidak hanya mencegah anak dari risiko perilaku negatif, tetapi juga memperkuat rasa percaya diri dan solidaritas sosial.

Kegiatan budaya menjadi bagian integral dalam pembentukan karakter anak dan pelestarian identitas lokal. Kota Jambi secara aktif melibatkan anak-anak dalam kegiatan seni dan budaya daerah, seperti tari tradisional, musik melayu, batik Jambi, dan festival budaya. Kegiatan ini tidak hanya memperkaya wawasan anak terhadap warisan budaya, tetapi juga menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah kelahiran dan nilai-nilai luhur bangsa. Pemerintah Kota Jambi bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan komunitas seni untuk memastikan bahwa kegiatan budaya dapat diakses oleh anak-anak dari berbagai latar belakang.

Melalui sinergi antara pendidikan formal, pemanfaatan waktu luang yang positif, dan pelestarian budaya, Kota Jambi terus memperkuat ekosistem yang mendukung tumbuh kembang anak secara holistik. Upaya ini menjadi bukti nyata bahwa anak-anak bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga aktor penting dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

A. WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

Pendidikan merupakan hak dasar yang melekat pada setiap anak sejak lahir, dan menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan. Dalam konteks nasional, kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun adalah bentuk komitmen negara untuk memastikan bahwa seluruh anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang merata dan berkualitas hingga jenjang menengah. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan angka partisipasi sekolah, tetapi juga mendorong pemerataan mutu

pendidikan, penghapusan diskriminasi, dan perlindungan anak dari berbagai bentuk eksploitasi sosial.

Secara umum, Wajib Belajar 12 Tahun mencakup pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) serta pendidikan menengah (SMA/MA/SMK). Pemerintah pusat menetapkan kebijakan ini sebagai strategi jangka panjang untuk membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini didukung oleh berbagai regulasi, seperti Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Pendidikan, serta sinergi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil.

Di Kota Jambi, implementasi Wajib Belajar 12 Tahun tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi telah diintegrasikan secara strategis ke dalam program pembangunan daerah, khususnya melalui inisiatif Kota Jambi Bahagia. Program ini merupakan pendekatan multidimensi yang menempatkan anak sebagai pusat pembangunan, dengan fokus pada pemenuhan hak-hak dasar anak, termasuk hak atas pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan.

Melalui Kota Jambi Bahagia, pemerintah kota telah mengembangkan berbagai kebijakan dan program yang mendukung pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun. Salah satu langkah konkret adalah penyediaan beasiswa daerah bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, anak penyandang disabilitas, dan anak-anak yang terdampak situasi sosial tertentu. Beasiswa ini tidak hanya mencakup biaya sekolah, tetapi juga bantuan perlengkapan belajar, transportasi, dan dukungan psikososial.

Dalam aspek kualitas pendidikan, Kota Jambi mendorong pengembangan Sekolah Ramah Anak sebagai bagian dari strategi

pelaksanaan Wajib Belajar. Sekolah-sekolah di kota ini diarahkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan, diskriminasi, dan tekanan akademik yang berlebihan. Guru dan tenaga kependidikan mendapatkan pelatihan tentang pendekatan pembelajaran inklusif, penguatan karakter, serta penanganan anak korban kekerasan dan anak berkebutuhan khusus.

Forum Anak Bumi Angso Duo juga berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun. Mereka terlibat dalam kampanye literasi, advokasi pendidikan inklusif, dan kegiatan edukatif yang mendorong anak-anak untuk tetap bersekolah dan mengejar cita-cita mereka. Kegiatan seperti “Kelas Inspirasi”, “Panggung Anak”, dan “Diskusi Tematik” menjadi ruang partisipatif bagi anak-anak untuk saling berbagi pengalaman dan motivasi.

Lebih jauh, Kota Jambi Bahagia menempatkan pendidikan sebagai bagian dari ekosistem kebahagiaan anak. Pendidikan tidak hanya dilihat sebagai proses akademik, tetapi sebagai ruang tumbuh yang mendukung perkembangan emosional, sosial, dan spiritual anak. Dengan pendekatan ini, anak-anak Kota Jambi tidak hanya belajar di sekolah, tetapi juga belajar menjadi manusia yang utuh—berdaya, berempati, dan berkontribusi.

Melalui sinergi antara kebijakan nasional dan program lokal, Kota Jambi menunjukkan bahwa pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun dapat menjadi lebih dari sekadar target angka. Ia menjadi gerakan kolektif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang adil untuk tumbuh, belajar, dan meraih masa depan yang cerah. Dalam semangat Kota Jambi Bahagia, pendidikan adalah jalan

menuju kebahagiaan anak—dan kebahagiaan anak adalah fondasi bagi masa depan kota yang berkelanjutan.

Tabel 7.1

Jumlah Peserta Didik Sekolah di Kota Jambi menurut Jenjang Pendidikan Dan Jenis Kelamin Tahun Ajaran 2024 - 2025

No	Jenis Kelamin	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Siswa SD/ Sederajat	29.411	27.759	57.710
2.	Siswa SMP/ Sederajat	9.435	9.537	18.972
Jumlah				76.682

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2025

Tabel 7.2

Angka Putus Sekolah di Kota Jambi menurut Jenjang Pendidikan Dan Jenis Kelamin Tahun Ajaran 2024 - 2025

No	Jenis Kelamin	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Siswa SD/ Sederajat	1	-	1
2.	Siswa SMP/ Sederajat	NA	NA	33
Jumlah				34

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2025

Tabel 7.3

Angka Kelulusan Sekolah di Kota Jambi menurut Jenjang Pendidikan Dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Jenis Kelamin	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Siswa SD/ Sederajat	1	-	1
2.	Siswa SMP/ Sederajat	NA	NA	33
Jumlah				34

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2025

B. SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA)

Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas tidak hanya bergantung pada aspek akademik, tetapi juga pada lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Dalam konteks Kota Jambi, upaya tersebut diwujudkan melalui integrasi konsep Sekolah Ramah Anak ke dalam program strategis Kota Jambi Bahagia. Program ini menempatkan kebahagiaan warga sebagai indikator kesejahteraan, termasuk kebahagiaan anak-anak sebagai generasi penerus.

Sekolah Ramah Anak di Kota Jambi dirancang sebagai ruang belajar yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan. Pemerintah Kota Jambi, melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah mendorong satuan pendidikan untuk menerapkan prinsip-prinsip ramah anak. Hal ini mencakup pelatihan guru dalam pendekatan psikologis yang positif, penyediaan fasilitas konseling, serta

pelibatan anak dalam kegiatan sekolah yang bersifat partisipatif dan menyenangkan.

Program Kota Jambi Bahagia memberikan dukungan nyata terhadap inisiatif ini dengan mengedepankan kebijakan yang berpihak pada anak. Salah satu bentuknya adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang ramah anak, penguatan peran sekolah sebagai pusat pembentukan karakter, serta peningkatan literasi emosional melalui kegiatan ekstrakurikuler yang kreatif dan reflektif. Dengan demikian, sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi rumah kedua yang membentuk anak-anak Jambi menjadi pribadi yang tangguh, berdaya, dan bahagia.

Implementasi sekolah ramah anak yang terintegrasi dengan visi Kota Jambi Bahagia telah menunjukkan dampak positif. Anak-anak merasa lebih dihargai, memiliki rasa aman dalam berinteraksi, serta menunjukkan peningkatan dalam semangat belajar dan prestasi. Sinergi antara dunia pendidikan dan kebijakan kota ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung tumbuh kembang anak secara utuh.

Tabel 7.4

Jumlah Sekolah Ramah Anak di Kota Jambi Tahun 2024

Sekolah	Tingkat Sekolah				
	TK	SD	SMP	MI	MTS
2024	157	204	74	9	8

Sumber : DPMPPA Kota Jambi, 2025

C. KETERSEDIAAN FASILITAS UNTUK KEGIATAN BUDAYA, KREATIVITAS, DAN REKREATIF YANG RAMAH ANAK

Pemenuhan hak anak atas kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreasi merupakan bagian integral dari pembangunan Kota Layak Anak. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media ekspresi, pembentukan karakter, dan penguatan identitas anak. Oleh karena itu, ketersediaan fasilitas yang mendukung aktivitas budaya dan rekreatif yang ramah anak menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu kota dalam mewujudkan lingkungan yang layak bagi tumbuh kembang anak.

Di Kota Jambi, komitmen terhadap penyediaan fasilitas budaya dan rekreatif yang ramah anak diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program yang terintegrasi dalam inisiatif Kota Jambi Bahagia. Pemerintah Kota Jambi menyadari bahwa kebahagiaan anak tidak hanya ditentukan oleh aspek pendidikan dan kesehatan, tetapi juga oleh kesempatan untuk bermain, berkarya, dan berinteraksi secara positif dengan lingkungan sosial dan budaya mereka.

Sejumlah ruang publik telah disulap menjadi kawasan ramah anak, seperti taman bermain yang dilengkapi dengan fasilitas edukatif, panggung terbuka untuk pertunjukan seni anak, serta perpustakaan kelurahan yang menyediakan buku-buku anak dan ruang baca yang nyaman. Pemerintah kota juga bekerja sama dengan komunitas seni dan budaya lokal untuk menyelenggarakan kegiatan seperti pelatihan tari tradisional, lomba pantun, dan festival seni anak yang rutin digelar di ruang publik. Kegiatan ini tidak

hanya memperkenalkan anak pada kekayaan budaya daerah, tetapi juga mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dan bangga terhadap identitas lokal.

Selain itu, fasilitas rekreatif seperti pusat olahraga anak, arena bermain indoor, dan wahana edukatif di museum daerah mulai dikembangkan dengan pendekatan inklusif. Anak-anak dari berbagai latar belakang, termasuk anak berkebutuhan khusus, diberikan akses yang setara untuk menikmati fasilitas tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Kota Jambi Bahagia yang menempatkan kebahagiaan anak sebagai indikator utama dalam pembangunan kota.

Forum Anak Bumi Angso Duo juga berperan aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan anak terhadap ruang kreatif dan rekreatif. Melalui musyawarah anak dan kegiatan advokasi, mereka menyampaikan aspirasi mengenai fasilitas yang dibutuhkan di lingkungan masing-masing. Pemerintah kota merespons dengan membentuk tim lintas sektor yang bertugas melakukan pemetaan dan pengembangan fasilitas berbasis kebutuhan anak.

Dengan tersedianya fasilitas budaya, kreativitas, dan rekreasi yang ramah anak, Kota Jambi tidak hanya menciptakan ruang fisik yang mendukung tumbuh kembang anak, tetapi juga membangun ekosistem sosial yang memperkuat rasa aman, percaya diri, dan kebahagiaan anak-anak. Upaya ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi Kota Jambi sebagai kota yang benar-benar layak dan membahagiakan bagi anak.

Sebagai bagian dari strategi berkelanjutan, Pemerintah Kota Jambi juga mendorong partisipasi sektor swasta dan dunia usaha dalam pengembangan

fasilitas budaya dan rekreatif yang ramah anak. Melalui program CSR (Corporate Social Responsibility), sejumlah perusahaan lokal telah berkontribusi dalam pembangunan taman tematik, ruang kreatif komunitas, dan penyediaan alat-alat kesenian untuk anak-anak di sekolah maupun sanggar. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa penciptaan lingkungan yang mendukung kebahagiaan dan kreativitas anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan gerakan bersama seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan Kota Jambi yang inklusif, inspiratif, dan penuh harapan bagi generasi masa depan.

Tabel 7.5

Jumlah Sanggar Seni di Kota Jambi Menurut Kecamatan tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah
1.	Telanaipura	6
2.	Kota Baru	28
3.	Alam Barajo	36
4.	Danau Sipin	12
5.	Jelutung	20
6.	Pasar Jambi	2
7.	Danau Teluk	1
8.	Pelayangan	14
9.	Paal Merah	25

No	Kecamatan	Jumlah
10.	Jambi Selatan	119
11.	Jambi Timur	10

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi, 2025

Tabel 7.6

Data Ruma Ibadah Ramah Anak di Kota Jambi Tahun 2024

No	Agama	Nama Rumah Ibadah
1.	Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masjid Baitul Iklas 2. Masjid Agung Nurul Ilmi 3. Masjid Miftahurrahman 4. Masjid Raya Miftahul Jannah 5. Masjid Hidayatullah 6. Masjid Al Hasanah 7. Masjid Taqwa Muhammadiyah 8. Masjid Al Munawarrah Aur Duri 9. Masjid Nurdin Hasanah 10. Masjid Mahabbatullah
2.	Kristen Protestan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gereja Kristen Protestan Jambi (GKPJ) 2. Gereja HKBP Jambi 3. Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat Marturia

No	Agama	Nama Rumah Ibadah
		4. Gereja Batak Karo Protestan Kota Baru 5. Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS)
3.	Kristen Katolik	1. Gereja Santa Theresia 2. Gereja Santo Gregorius Agung Paroki
4.	Budha	1. Vihara Amrta 2. Vihara Sakyakirti
5.	Konghucu	1. Kelenteng Leng Chun Keng Jambi 2. Kelenteng Tua Pe Kong
6.	Hindu	1. Pura Giri Indra Lokha

Sumber : DPMPPA Kota Jambi, 2025

BAB VIII

PERLINDUNGAN KHUSUS

Perlindungan khusus merupakan bentuk intervensi negara terhadap anak-anak yang berada dalam situasi rentan, baik karena kondisi sosial, ekonomi, maupun hukum. Anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus meliputi anak korban kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak penyandang disabilitas, anak korban bencana, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta anak yang mengalami eksploitasi atau diskriminasi. Dalam kerangka pembangunan Kota Layak Anak, perlindungan khusus menjadi pilar penting yang memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam proses pembangunan.

Pemerintah Kota Jambi telah menunjukkan komitmen kuat dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak melalui berbagai kebijakan dan program lintas sektor. Salah satu langkah strategis adalah pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) yang berfungsi sebagai pusat layanan terpadu bagi anak korban kekerasan dan pelanggaran hak. UPT PPA ini menyediakan layanan konseling, pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, serta rujukan medis dan psikologis secara gratis dan rahasia.

Selain itu, Kota Jambi juga mengembangkan sistem pelaporan kekerasan terhadap anak yang mudah diakses oleh masyarakat, termasuk melalui aplikasi digital dan hotline pengaduan. Forum Anak Bumi Angso Duo turut berperan aktif dalam menyuarakan isu perlindungan anak, serta

menjadi mitra pemerintah dalam menyebarkan informasi dan edukasi mengenai hak-hak anak dan mekanisme perlindungan yang tersedia.

Dalam situasi darurat seperti bencana alam atau konflik sosial, Pemerintah Kota Jambi telah menetapkan protokol perlindungan anak yang memastikan kebutuhan dasar anak terpenuhi dan mereka tidak menjadi korban eksploitasi atau penelantaran. Pendekatan inklusif juga diterapkan dalam perlindungan anak penyandang disabilitas, dengan penyediaan fasilitas publik yang aksesibel dan pelatihan bagi tenaga pendidik serta petugas layanan sosial.

Melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media, Kota Jambi terus memperkuat sistem perlindungan khusus yang responsif, inklusif, dan berbasis hak anak. Upaya ini sejalan dengan visi Kota Jambi Bahagia, di mana setiap anak, tanpa terkecuali, merasa aman, dihargai, dan dilindungi dalam setiap aspek kehidupannya.

A. PENCEGAHAN DALAM PERLINDUNGAN KHUSUS

Upaya perlindungan anak tidak hanya dilakukan melalui penanganan kasus, tetapi harus dimulai dari langkah-langkah pencegahan yang sistematis, terencana, dan berbasis hak anak. Pencegahan dalam perlindungan khusus bertujuan untuk menghindarkan anak dari berbagai situasi yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak, seperti kekerasan fisik dan psikis, eksploitasi seksual, perdagangan anak, pernikahan usia dini, serta keterlibatan dalam tindak pidana. Strategi pencegahan ini menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem perlindungan anak yang berkelanjutan.

Di Kota Jambi, pendekatan pencegahan dilakukan secara lintas sektor dan terintegrasi dalam program Kota Jambi Bahagia. Pemerintah kota telah mengembangkan berbagai kebijakan dan intervensi yang berorientasi pada pencegahan dini, baik melalui edukasi masyarakat, penguatan kapasitas keluarga, maupun peningkatan peran satuan pendidikan dan komunitas lokal. Salah satu bentuk nyata dari upaya ini adalah pelaksanaan kampanye Stop Kekerasan terhadap Anak yang dilakukan secara rutin di sekolah, ruang publik, dan media sosial, dengan melibatkan Forum Anak Bumi Angso Duo sebagai agen perubahan.

Selain itu, Pemerintah Kota Jambi juga mendorong pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Anak di tingkat kelurahan, yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam mendeteksi potensi risiko dan memberikan respons cepat terhadap laporan masyarakat. Satgas ini terdiri dari unsur pemerintah, tokoh masyarakat, kader PKK, dan relawan anak, yang telah mendapatkan pelatihan dasar mengenai perlindungan anak dan mekanisme pelaporan kasus. Pendekatan berbasis komunitas ini terbukti efektif dalam menjangkau anak-anak yang berada di lingkungan rentan dan belum terakses oleh layanan formal.

Dalam ranah pendidikan, sekolah-sekolah di Kota Jambi telah mulai menerapkan kurikulum tambahan berupa pendidikan karakter, literasi hak anak, dan penguatan nilai-nilai toleransi serta antikekerasan. Guru dan tenaga kependidikan dilatih untuk mengenali tanda-tanda anak yang mengalami tekanan psikologis atau kekerasan, serta diberikan panduan untuk melakukan intervensi awal dan rujukan ke layanan profesional. Upaya

ini diperkuat dengan penyediaan ruang konseling di sekolah dan pelibatan orang tua dalam forum komunikasi rutin.

Pencegahan juga dilakukan melalui pendekatan digital, mengingat meningkatnya risiko kekerasan dan eksploitasi anak di ruang siber. Pemerintah Kota Jambi bekerja sama dengan komunitas literasi digital dan lembaga perlindungan anak untuk menyelenggarakan pelatihan dan kampanye Internet Aman untuk Anak, yang bertujuan membekali anak dan orang tua dengan pengetahuan tentang etika digital, keamanan data pribadi, dan cara melaporkan konten berbahaya.

Melalui berbagai strategi pencegahan yang terintegrasi, Kota Jambi menunjukkan komitmen kuat dalam membangun sistem perlindungan anak yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dan berkelanjutan. Pencegahan dalam perlindungan khusus menjadi fondasi penting dalam mewujudkan visi Kota Jambi Bahagia, di mana setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap pencegahan, Pemerintah Kota Jambi juga mengembangkan sistem pelaporan berbasis teknologi yang ramah anak dan mudah diakses oleh masyarakat. Melalui aplikasi layanan pengaduan dan kanal media sosial resmi, anak-anak dan keluarga dapat melaporkan potensi pelanggaran hak secara cepat dan aman. Sistem ini dilengkapi dengan fitur anonimitas dan respons cepat dari petugas yang telah dilatih secara khusus. Dengan memanfaatkan teknologi digital, Kota Jambi memperkuat mekanisme perlindungan yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman, sekaligus mendorong partisipasi aktif

masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi terhadap anak.

Tabel 8.1

Data Kegiatan Perlindungan Khusus Anak Di Kota Jambi Tahun 2024

NO	15 Jenis PMPK	Perangkat Daerah yang terlibat	Program
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Anak dalam situasi darurat	Dinas Sosial	UPTD PPA bersama Dinas Sosial melakukan pendampingan terhadap para korban
2.	Anak yang berhadapan dengan hukum	Bapas	Bapas melakukan pendampingan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum
3.	Anak dari kelompok-minoritas dan terisolasi		Tidak ada anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
4.	Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual	UPTD PPA Kota Jambi	UPTD PPA melakukan pendampingan terhadap para korban
5.	Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya	BNN	UPTD PPA bersama BNN Kota Jambi melakukan pendampingan terhadap para korban
6.	Anak yang menjadi korban pornografi	UPTD PPA Kota Jambi	UPTD PPA bersama Polresta melakukan pendampingan terhadap para korban
7.	Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis	UPTD PPA Kota Jambi	UPTD PPA bersama Polresta Jambi melakukan pendampingan terhadap para korban

NO	15 Jenis PMPK	Perangkat Daerah yang terlibat	Program
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Anak dengan HIV/AIDS	Puskesmas	UPTD PPA dan Puskesmas melakukan pendampingan dan pemeriksaan terhadap korban
9.	Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan	UPTD PPA Kota Jambi	UPTD PPA bersama Polresata Jambi melakukan pendampingan terhadap para korban
10.	Anak korban kejahatan seksual	Polresta	Polresta Jambi bersama UPTD PPA melakukan pendampingan terhadap para korban
11.	Anak korban jaringan terorisme	Kesbangpol	Kesbangpol dan Polresata Jambi melakukan pembinaan terhadap korban
12.	Anak penyandang disabilitas	Dinsos, UPTD PPA Kota Jambi	Dinas Sosial dan UPTD PPA melakukan pendampingan terhadap anak disabilitas
13.	Anak korban perlakuan salah dan penelantaran	UPTD PPA Kota Jambi	Dinas Sosial dan UPTD PPA melakukan pendampingan terhadap anak disabilitas
14.	Anak dengan perilaku sosial menyimpang	UPTD PPA Kota Jambi	Dinas Sosial dan UPTD PPA melakukan pendampingan terhadap anak perilaku sosial Menyimpang
15.	Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya	UPTD PPA Kota Jambi	UPTD PPA melakukan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuannya

Sumber : DPMPPA Kota Jambi, 2025

B. PELAYANAN BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN DAN EKSPLOITASI

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan eksploitasi memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun hukum. Pelayanan bagi anak korban harus dilakukan dengan pendekatan yang berpusat pada anak, menjunjung tinggi martabat dan hak anak, serta memastikan bahwa setiap intervensi dilakukan secara sensitif dan tidak menimbulkan trauma tambahan. Di Kota Jambi, pelayanan ini menjadi bagian integral dari strategi perlindungan anak yang inklusif dan responsif.

Pemerintah Kota Jambi telah membentuk Unit Layanan Terpadu Perlindungan Anak (ULTPA) yang berfungsi sebagai pusat koordinasi penanganan kasus kekerasan terhadap anak. ULTPA melibatkan berbagai unsur seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kepolisian, tenaga medis, psikolog, pekerja sosial, dan lembaga bantuan hukum. Unit ini menyediakan layanan konseling, pendampingan hukum, rehabilitasi medis, serta rujukan ke lembaga perlindungan yang relevan. Proses penanganan dilakukan secara terpadu dan berjenjang, dengan memastikan bahwa anak korban mendapatkan perlakuan yang adil, aman, dan sesuai dengan kebutuhannya.

Sebagai bagian dari program Kota Jambi Bahagia, pemerintah juga mengembangkan Rumah Aman Anak, yaitu fasilitas sementara yang disediakan bagi anak korban kekerasan yang membutuhkan perlindungan darurat. Rumah Aman ini dilengkapi dengan ruang konseling, fasilitas kesehatan, dan pendampingan psikososial yang bertujuan untuk memulihkan

kondisi anak sebelum kembali ke lingkungan yang aman. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penyelamatan fisik, tetapi juga pada pemulihan mental dan penguatan kembali rasa percaya diri anak.

Pelayanan bagi anak korban juga mencakup pendampingan dalam proses hukum, di mana anak diberikan perlindungan dari intimidasi, diskriminasi, dan tekanan selama proses peradilan. Pemerintah Kota Jambi bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa anak korban diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak, bukan sekadar objek perkara. Pendampingan ini mencakup penyediaan informasi yang mudah dipahami oleh anak, kehadiran pendamping selama pemeriksaan, serta perlindungan identitas anak dari publikasi yang merugikan.

Selain itu, pendekatan komunitas juga dioptimalkan melalui pelibatan Forum Anak dan relawan perlindungan anak dalam mendeteksi dan mendampingi anak korban di lingkungan masing-masing. Forum Anak Bumi Angso Duo, sebagai representasi suara anak di Kota Jambi, turut berperan dalam menyuarakan pentingnya pemulihan yang bermartabat dan mendukung teman sebaya yang mengalami kekerasan. Kegiatan peer support dan kampanye pemulihan menjadi bagian dari strategi sosial yang memperkuat solidaritas dan empati antar anak.

Melalui pelayanan yang komprehensif dan berkelanjutan, Kota Jambi menunjukkan komitmen nyata dalam memastikan bahwa setiap anak korban kekerasan dan eksploitasi mendapatkan haknya untuk pulih, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Pendekatan ini sejalan dengan visi Kota Jambi

Bahagia, di mana tidak ada anak yang tertinggal dalam perlindungan dan pemulihan.

Tabel 8.2

Data Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi yang ditangani UPTD PPA Kota Jambi Tahun 2024

No	Jumlah Anak Terlayani	Jenis layanan yang diterima
1	10	Anak yang melaporkan
2	1	Anak yang mendapatkan layanan penampungan untuk pengasuhan sementara
3	56	Anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesehatan
4	50	Anak yang mendapatkan layanan pendidikan termasuk pendidikan keterampilan (life skill)
5	5	Anak yang mendapatkan layanan standar hidup layak (fisik, spiritual, mental, moral, dan sosial anak)
6	35	Anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum
7	2	Anak yang mendapatkan layanan pemulangan dan reunifikasi dengan keluarga
8	6	Anak yang mendapatkan layanan pengasuhan alternatif
9	2	Anak yang mendapatkan layanan reintegrasi sosial (lanjutan)

Sumber : DPMPPA Kota Jambi, 2025

C. ANAK YANG DIBEBAHKAN DARI PEKERJA ANAK (PA) DAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK (BPTA)

Pemerintah Kota Jambi memandang isu pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA) sebagai tantangan serius yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan. Anak-anak yang terlibat dalam aktivitas kerja, khususnya yang bersifat eksploitasi dan membahayakan, berisiko mengalami gangguan fisik, psikologis, serta kehilangan hak-hak dasar mereka, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. Oleh karena itu, upaya pembebasan anak dari situasi kerja yang tidak layak menjadi bagian integral dari strategi perlindungan khusus yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Jambi.

Berbagai langkah telah dilakukan untuk mengidentifikasi, menangani, dan mencegah keterlibatan anak dalam pekerjaan yang bersifat eksploitatif. Melalui koordinasi lintas sektor, anak-anak yang terindikasi sebagai pekerja anak telah mendapatkan intervensi berupa rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, serta reintegrasi ke dalam sistem pendidikan formal. Pemerintah daerah juga melaksanakan program pemberdayaan ekonomi keluarga, dengan tujuan mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap anak dan mendorong orang tua untuk menjadi pelindung utama hak-hak anak. Di samping itu, kampanye publik mengenai bahaya pekerja anak dan pentingnya pendidikan telah digencarkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat secara luas.

Secara regulatif, Pemerintah Kota Jambi telah memperkuat kebijakan daerah yang mendukung penghapusan pekerja anak, termasuk pengawasan terhadap sektor informal yang rentan mempekerjakan anak. Dunia usaha

juga dilibatkan dalam upaya ini melalui penerapan prinsip bisnis yang ramah anak dan bebas eksploitasi. Forum Anak Kota Jambi turut berperan aktif dalam advokasi dan edukasi sebaya, serta menjadi mitra strategis dalam menyuarkan aspirasi anak terkait hak atas perlindungan dari pekerjaan yang merugikan.

Meskipun capaian yang diraih menunjukkan tren positif, tantangan masih tetap ada, terutama dalam hal pendataan yang akurat, perubahan pola pikir masyarakat, serta keterbatasan sumber daya di tingkat komunitas. Pemerintah Kota Jambi berkomitmen untuk terus memperkuat sistem perlindungan anak melalui pendekatan yang holistik, berbasis hak anak, dan berorientasi pada pencegahan. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan anak-anak itu sendiri, diharapkan Kota Jambi dapat menjadi lingkungan yang sepenuhnya bebas dari praktik pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang mengancam masa depan generasi muda.

Sebagai bagian dari penguatan sistem perlindungan anak, Pemerintah Kota Jambi juga melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam penanganan kasus pekerja anak dan BPTA. Dengan membangun jejaring perlindungan yang kuat di tingkat lokal, Kota Jambi berupaya menciptakan ekosistem yang mampu mencegah, merespons, dan memulihkan anak dari situasi kerja yang merugikan, sekaligus memperkuat komitmen daerah dalam mewujudkan Kota Layak Anak secara menyeluruh.

Tabel 8.3**Jenis Layanan Bagi pada UPTD PPA Kota Jambi**

No	Jenis Layanan yang diberikan
1.	anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesehatan
2.	anak yang mendapatkan layanan pendidikan
3.	anak yang mendapatkan layanan standar hidup layak (fisik, spiritual, mental, moral, dan sosial anak)
4.	anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum
5.	anak yang mendapatkan layanan pemulangan dan reunifikasi dengan keluarga
6.	anak yang mendapatkan layanan pengasuhan alternatif
7.	anak yang mendapatkan layanan reintegrasi social

Sumber : DPMPPA Kota Jambi, 2025

D. PELAYANAN BAGI ANAK KORBAN PORNOGRAFI, NAPZA, DAN TERINFEKSI HIV/AIDS

Pemerintah Kota Jambi memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak yang menjadi korban pornografi, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta anak-anak yang terinfeksi HIV/AIDS. Kelompok anak ini termasuk dalam kategori sangat rentan, karena mereka tidak hanya menghadapi ancaman terhadap kesehatan fisik dan mental, tetapi juga stigma sosial yang dapat menghambat proses pemulihan dan reintegrasi mereka ke dalam lingkungan yang sehat dan mendukung. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan kepada mereka dirancang secara

komprehensif, berbasis hak anak, dan mengedepankan pendekatan yang inklusif serta berempati.

Pelayanan bagi anak korban pornografi difokuskan pada pemulihan psikososial, perlindungan hukum, dan pendampingan dalam proses rehabilitasi. Pemerintah Kota Jambi bekerja sama dengan aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, serta tenaga psikolog untuk memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban tidak mengalami reviktimisasi dalam proses penanganan kasus. Di sisi lain, anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan NAPZA mendapatkan layanan rehabilitasi medis dan psikologis melalui fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk, serta pendampingan sosial untuk mendukung proses pemulihan dan mencegah kekambuhan.

Bagi anak-anak yang terinfeksi HIV/AIDS, Pemerintah Kota Jambi menyediakan layanan kesehatan yang ramah anak, termasuk akses terhadap pengobatan antiretroviral (ARV), konseling, dan dukungan sosial. Upaya ini dilengkapi dengan program edukasi kepada keluarga dan masyarakat untuk mengurangi stigma serta meningkatkan pemahaman mengenai HIV/AIDS sebagai isu kesehatan yang dapat ditangani secara medis. Pemerintah juga mendorong keterlibatan sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung bagi anak-anak yang hidup dengan HIV/AIDS.

Sepanjang tahun 2024, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Jambi *tidak menerima laporan kasus anak yang menjadi korban HIV/AIDS, penyalahgunaan NAPZA, maupun pornografi*. Data ini menunjukkan bahwa meskipun potensi risiko tetap ada, upaya preventif dan

edukatif yang dilakukan oleh berbagai pihak telah memberikan dampak positif dalam menekan angka kasus di wilayah Kota Jambi.

Dalam pelaksanaannya, pelayanan bagi anak-anak dalam kategori ini tidak hanya berorientasi pada pemulihan individu, tetapi juga pada penguatan sistem perlindungan secara menyeluruh. Pemerintah Kota Jambi terus meningkatkan kapasitas tenaga layanan, memperluas jangkauan program ke wilayah-wilayah yang belum terakses, serta memperkuat koordinasi antar lembaga untuk memastikan bahwa setiap anak yang membutuhkan perlindungan khusus mendapatkan layanan yang sesuai, bermartabat, dan berkelanjutan.

E. PELAYANAN BAGI ANAK KORBAN BENCANA DAN KONFLIK

Anak-anak yang menjadi korban bencana dan konflik merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak, termasuk kehilangan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, tempat tinggal yang layak, serta dukungan psikososial. Dalam situasi darurat, anak-anak sering kali mengalami disorientasi, trauma, dan ketidakpastian yang dapat berdampak jangka panjang terhadap tumbuh kembang mereka. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Jambi menempatkan pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik sebagai prioritas dalam sistem perlindungan khusus yang berbasis hak anak.

Pelayanan yang diberikan mencakup penyediaan tempat perlindungan sementara yang aman dan ramah anak, pendampingan psikologis oleh tenaga profesional, serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan layanan kesehatan. Pemerintah Kota Jambi juga memastikan

bahwa anak-anak tetap mendapatkan akses terhadap pendidikan melalui penyediaan ruang belajar darurat dan dukungan dari tenaga pendidik. Dalam situasi konflik sosial atau kekerasan komunal, pendekatan restoratif dan mediasi komunitas turut diterapkan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemulihan anak.

Koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam penanganan anak korban bencana dan konflik. Selain itu, pelibatan Forum Anak dan relawan muda dalam kegiatan pemulihan turut memberikan ruang bagi anak-anak untuk berpartisipasi aktif dalam membangun kembali lingkungan mereka secara aman dan inklusif.

Sepanjang tahun 2024, Kota Jambi tidak mengalami bencana alam berskala besar maupun konflik sosial yang berdampak langsung terhadap anak. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Jambi tetap melakukan simulasi kesiapsiagaan, pelatihan tanggap darurat, serta edukasi kebencanaan di sekolah-sekolah sebagai langkah preventif. Upaya ini bertujuan untuk membangun ketangguhan anak dalam menghadapi situasi krisis, sekaligus memperkuat sistem perlindungan yang adaptif dan responsif terhadap berbagai potensi risiko di masa mendatang.

Sebagai bentuk kesiapsiagaan terhadap potensi bencana dan konflik di masa mendatang, Pemerintah Kota Jambi juga mengintegrasikan perspektif perlindungan anak ke dalam dokumen perencanaan kebencanaan daerah. Selain itu, pelatihan tanggap darurat yang melibatkan anak-anak secara langsung telah dilaksanakan di beberapa sekolah dan komunitas, dengan tujuan membekali mereka pengetahuan dasar mengenai evakuasi, pertolongan pertama, dan perlindungan diri.

Kegiatan mengisi waktu luang anak-anak korban bencana di Kota Jambi



F. PELAYANAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS, KELOMPOK MINORITAS, DAN TERISOLASI

Pemerintah Kota Jambi terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan layanan perlindungan anak yang inklusif dan berkeadilan, terutama bagi anak-anak yang berada dalam kelompok rentan. Anak penyandang disabilitas, anak dari kelompok minoritas, serta anak-anak yang hidup dalam kondisi terisolasi secara geografis atau sosial sering kali

menghadapi hambatan ganda dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Untuk menjawab tantangan ini, berbagai kebijakan dan program telah dirancang secara khusus agar mampu menjangkau dan memenuhi kebutuhan mereka secara menyeluruh.

Dalam bidang pendidikan, Pemerintah Kota Jambi telah mengembangkan sekolah inklusif yang tidak hanya menerima anak-anak dengan disabilitas, tetapi juga menyediakan fasilitas pendukung seperti alat bantu belajar, pendamping khusus, dan pelatihan bagi guru agar mampu menerapkan pendekatan pedagogis yang adaptif. Selain itu, kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat turut memperluas jangkauan layanan hingga ke komunitas minoritas dan daerah terpencil, melalui program pendidikan nonformal dan kelas komunitas yang berbasis budaya lokal.

Di sektor kesehatan, layanan ramah disabilitas mulai diterapkan di beberapa puskesmas dan rumah sakit daerah, dengan penyediaan jalur akses yang mudah, ruang konsultasi yang tenang, serta tenaga medis yang telah mendapatkan pelatihan tentang komunikasi efektif dengan anak berkebutuhan khusus. Pemerintah juga menginisiasi program kunjungan kesehatan ke daerah terisolasi, di mana tim medis bergerak secara berkala untuk memberikan imunisasi, pemeriksaan rutin, dan edukasi kesehatan kepada anak-anak dan keluarganya.

Tak kalah penting, pendekatan berbasis komunitas menjadi strategi utama dalam menjangkau anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi. Melalui forum anak desa, pelibatan tokoh adat, dan fasilitator lokal, suara anak-anak dari latar belakang yang beragam mulai diangkat dalam proses

perencanaan dan evaluasi kebijakan. Hal ini menciptakan ruang partisipasi yang lebih luas dan memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap program perlindungan anak.

Dengan berbagai upaya tersebut, Pemerintah Kota Jambi berusaha memastikan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, memiliki hak yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan terlindungi dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Prinsip “no one left behind” bukan sekadar slogan, melainkan menjadi landasan dalam membangun sistem perlindungan anak yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 8.6

Rekapitulasi Data Anak Penyandang Disabilitas menurut Kecamatan di Kota Jambi Tahun 2024

No	Indikator	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Kecamatan Pasar	148	105	253

Sumber : Dinas Sosial Kota Jambi, 2025

G. PELAYANAN BAGI ANAK DENGAN PERILAKU SOSIAL MENYIMPANG (PSM)

Anak dengan perilaku sosial menyimpang (PSM) merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai risiko sosial dan psikologis. Perilaku menyimpang ini merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, seperti kenakalan remaja,

perundungan, pencurian, penyalahgunaan zat, hingga perilaku agresif lainnya. Anak-anak yang menunjukkan perilaku semacam ini sering kali bukan pelaku tunggal, melainkan korban dari lingkungan yang tidak mendukung tumbuh kembang mereka secara sehat. Faktor-faktor seperti konflik keluarga, pengabaian orang tua, tekanan dari lingkungan sekolah, serta pengaruh negatif media dan teknologi menjadi pemicu utama munculnya perilaku menyimpang.

Pelayanan sosial bagi anak dengan PSM bertujuan untuk memberikan intervensi yang komprehensif agar mereka dapat kembali ke jalur perkembangan yang positif. Pelayanan ini mencakup berbagai pendekatan, mulai dari konseling individu dan keluarga, rehabilitasi sosial, pendidikan alternatif, hingga pendampingan oleh pekerja sosial. Konseling bertujuan untuk menggali akar masalah dan membangun komunikasi yang sehat antara anak dan orang tua. Rehabilitasi sosial dilakukan melalui lembaga atau panti sosial yang menyediakan lingkungan aman dan mendukung proses pemulihan. Sementara itu, pendidikan alternatif seperti pelatihan keterampilan atau program kejar paket menjadi solusi bagi anak yang mengalami hambatan dalam pendidikan formal.

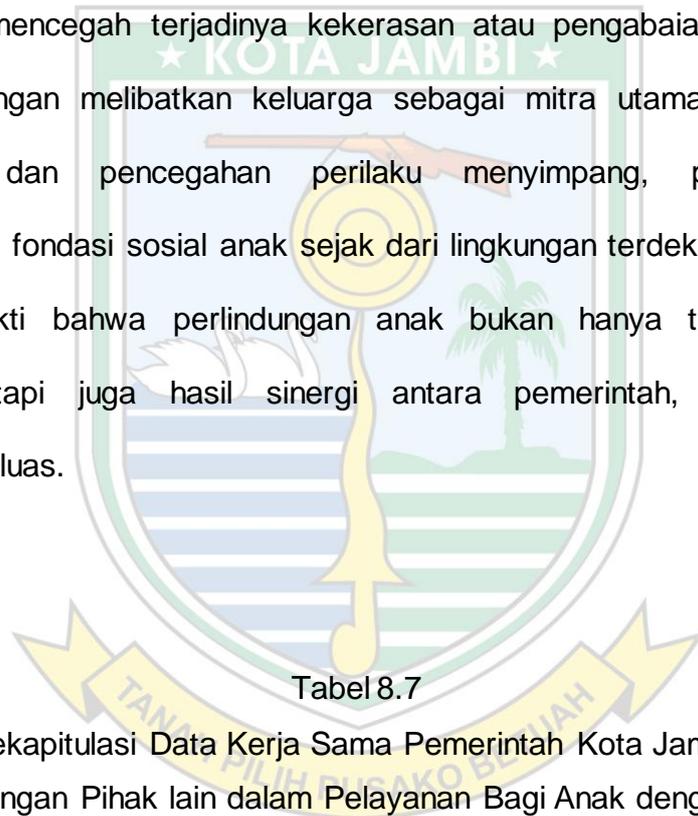
Di Kota Jambi, upaya pelayanan terhadap anak dengan PSM dilakukan secara kolaboratif oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas ini tidak hanya menjalankan program-program perlindungan anak secara mandiri, tetapi juga menjalin kerja sama strategis dengan berbagai instansi terkait. Di antaranya adalah Balai Pemasarakatan (Bapas), yang berperan dalam pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum, serta Panti Sosial Alyatama, yang menyediakan layanan rehabilitasi

dan pembinaan sosial bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Selain itu, Dinas juga mengoperasikan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Putri Pinang Masak, yang menjadi wadah edukasi dan konseling bagi keluarga, khususnya orang tua, dalam membangun pola asuh yang positif dan mencegah perilaku menyimpang pada anak sejak dini. PUSPAGA ini berfungsi sebagai ruang aman untuk konsultasi, edukasi, dan penguatan kapasitas keluarga dalam menghadapi tantangan pengasuhan anak di era modern.

Peran lembaga dan masyarakat sangat penting dalam mendukung pelayanan ini. Pemerintah melalui Dinas Sosial dan lembaga perlindungan anak memiliki tanggung jawab utama dalam menyediakan fasilitas dan kebijakan yang mendukung. Selain itu, LSM, komunitas lokal, dan sekolah juga berperan sebagai mitra strategis dalam deteksi dini dan intervensi. Keluarga, sebagai unit terkecil dalam masyarakat, menjadi garda terdepan dalam proses pemulihan anak dengan PSM. Namun, dalam pelaksanaannya, pelayanan ini menghadapi berbagai tantangan seperti stigma sosial terhadap anak yang menyimpang, keterbatasan tenaga profesional, minimnya anggaran, serta koordinasi antar lembaga yang belum optimal.

Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang diharapkan mampu menciptakan ruang aman bagi mereka untuk tumbuh, belajar, dan memperbaiki diri. Anak-anak ini bukan sekadar objek intervensi, melainkan subjek yang memiliki potensi besar untuk berubah dan berkontribusi positif bagi masyarakat jika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat.

Sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi secara aktif mengembangkan pendekatan berbasis keluarga dan komunitas. Melalui PUSPAGA Putri Pinang Masak, dinas ini menyediakan layanan konseling, edukasi pengasuhan, dan pendampingan psikologis yang dapat diakses oleh masyarakat secara gratis. PUSPAGA berfungsi sebagai ruang pembelajaran keluarga yang mendorong terciptanya pola asuh yang ramah anak dan mencegah terjadinya kekerasan atau pengabaian dalam rumah tangga. Dengan melibatkan keluarga sebagai mitra utama dalam proses pemulihan dan pencegahan perilaku menyimpang, pendekatan ini memperkuat fondasi sosial anak sejak dari lingkungan terdekatnya. Upaya ini menjadi bukti bahwa perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga hasil sinergi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat luas.



Tabel 8.7

Rekapitulasi Data Kerja Sama Pemerintah Kota Jambi dengan Pihak lain dalam Pelayanan Bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM) tahun 2024

No.	Nama Kerja Sama	Intansi/ Lembaga
1.	Perlindungan anak yang memerlukan perlindungan khusus	Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) ALYATAMA Kementerian Sosial Republik Indonesia

2.	Perlindungan anak dan pemenuhan hak anak	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kota Jambi
3.	Perlindungan anak yang memerlukan perlindungan khusus	Balai Pemasayarakatan (BAPAS) Kota Jambi

Sumber : DPMPPA Kota Jambi, 2025

H. PENYELESAIAN KASUS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) MELALUI DIVERSI (KHUSUS PELAKU)

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan individu di bawah usia 18 tahun yang diduga, dituduh, atau terbukti melakukan tindak pidana. Dalam penanganannya, pendekatan yang digunakan tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan lebih menekankan pada prinsip keadilan restoratif. Salah satu bentuk konkret dari pendekatan ini adalah diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan formal. Diversi bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani hukuman yang bersifat represif.

Pelaksanaan diversi dilakukan sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, dengan mempertimbangkan jenis tindak pidana, usia anak, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Diversi hanya dapat dilakukan terhadap anak pelaku yang melakukan tindak pidana ringan, bukan residivis, dan tidak menimbulkan korban jiwa. Proses ini melibatkan berbagai pihak, seperti penyidik, jaksa, hakim, pekerja sosial, serta keluarga

anak dan korban. Tujuan utamanya adalah mencapai kesepakatan antara pelaku dan korban, serta menyusun rencana pemulihan yang adil dan proporsional. Dalam konteks ini, anak pelaku tidak hanya diminta untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, tetapi juga diberikan ruang untuk belajar, memperbaiki diri, dan kembali diterima oleh lingkungan sosialnya.

Di Kota Jambi, pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana telah menjadi bagian penting dalam sistem perlindungan anak. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak turut berperan aktif dalam mendampingi proses diversifikasi, bekerja sama dengan Balai Pemasarakatan (Bapas), Panti Sosial Alyatama, serta PUSPAGA Putri Pinang Masak. Kolaborasi ini memastikan bahwa anak pelaku tidak hanya mendapatkan penyelesaian hukum yang adil, tetapi juga layanan rehabilitasi sosial dan psikologis yang mendukung proses pemulihan. Melalui pendekatan ini, diharapkan anak yang pernah berhadapan dengan hukum dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif dan tidak mengulangi perbuatannya.

Tabel 8.8

Data Anak Kota Jambi Korban Kekerasan yang mendapatkan Bantuan Hukum Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Tahun	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	2024		

Sumber : DPMPPA Kota Jambi, 2025

I. PELAYANAN BAGI ANAK KORBAN JARINGAN TERORISME DAN STIGMATISASI AKIBAT DARI PELABELAN TERKAIT DENGAN KONDISI ORANG TUANYA

Anak-anak yang menjadi korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat pelabelan terhadap kondisi orang tuanya merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap pengucilan sosial, tekanan psikologis, dan gangguan dalam proses tumbuh kembang. Mereka sering kali mengalami diskriminasi, baik di lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun dalam akses terhadap layanan publik. Kondisi ini dapat berdampak serius terhadap rasa percaya diri, identitas diri, serta masa depan anak. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Jambi menempatkan pelayanan bagi anak-anak dalam kategori ini sebagai bagian penting dari sistem perlindungan khusus yang berbasis hak anak dan nondiskriminatif.

Pelayanan yang diberikan mencakup pendekatan psikososial, konseling individu dan keluarga, serta fasilitasi reintegrasi sosial yang aman dan bermartabat. Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya menciptakan ruang aman bagi anak-anak yang terdampak, dengan memastikan bahwa mereka tidak diperlakukan sebagai pelaku atau bagian dari kesalahan orang tuanya. Dalam hal ini, keberadaan PUSPAGA Putri Pinang Masak menjadi sangat relevan, karena menyediakan layanan konseling dan edukasi pengasuhan yang mendukung pemulihan psikologis anak dan penguatan peran keluarga sebagai pelindung utama.

Selain itu, kerja sama lintas sektor juga dijalin dengan instansi terkait seperti Balai Pemasarakatan (Bapas), lembaga pendidikan, dan organisasi

masyarakat sipil untuk memastikan bahwa anak-anak korban stigmatisasi mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Upaya ini mencakup pelatihan bagi tenaga pendidik dan petugas layanan publik agar mampu mengenali dan menangani kasus diskriminasi secara tepat, serta mendorong terciptanya lingkungan sosial yang inklusif dan mendukung. Pemerintah juga melakukan advokasi kebijakan untuk mencegah praktik pelabelan terhadap anak berdasarkan latar belakang orang tua, termasuk dalam dokumen administrasi dan proses pelayanan publik.

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat laporan resmi yang masuk ke UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi terkait kasus anak korban jaringan terorisme maupun stigmatisasi akibat pelabelan orang tua. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Jambi tetap melakukan langkah-langkah preventif melalui edukasi masyarakat, penguatan sistem deteksi dini, dan peningkatan kapasitas layanan agar siap merespons jika kasus serupa muncul di masa mendatang. Pendekatan ini mencerminkan komitmen daerah dalam menjamin bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang keluarga, memiliki hak yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan dilindungi secara utuh.

Kegiatan pencegahan dan penanganan anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya oleh UPTD PPA DPMPPA di sekolah-sekolah yaitu melalui kegiatan inovasi PITA MOLIN



BAB IX

PENYELENGGARAAN KLA DI KECAMATAN DAN KELURAHAN

Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan sebuah komitmen nasional yang bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dalam pelaksanaannya, pendekatan berbasis wilayah menjadi strategi penting, di mana kecamatan dan desa/kelurahan memegang peranan sentral sebagai ujung tombak pelayanan langsung kepada masyarakat. Pemerintah Kota Jambi menyadari bahwa keberhasilan KLA tidak hanya ditentukan oleh kebijakan di tingkat kota, tetapi juga oleh efektivitas implementasi di tingkat lokal yang bersentuhan langsung dengan kehidupan anak sehari-hari.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, Pemerintah Kota Jambi telah mendorong pembentukan Gugus Tugas KLA di seluruh kecamatan dan desa/kelurahan. Gugus Tugas ini berfungsi sebagai motor penggerak pelaksanaan program KLA di wilayah masing-masing, dengan melibatkan berbagai unsur seperti perangkat daerah, tokoh masyarakat, kader PKK, tenaga kesehatan, pendidik, organisasi kepemudaan, serta perwakilan anak dan remaja. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi fondasi penting dalam membangun sistem perlindungan anak yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Sepanjang tahun 2024, sejumlah kecamatan di Kota Jambi telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pelaksanaan KLA. Kecamatan Jambi Timur, misalnya, telah menginisiasi program “Kampung Ramah Anak”

yang melibatkan masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas kekerasan dan mendukung pendidikan anak. Di Kecamatan Telanaipura, Forum Anak Kecamatan aktif menyuarakan aspirasi anak melalui kegiatan musyawarah anak dan kampanye digital tentang hak anak. Sementara itu, Kecamatan Alam Barajo telah membentuk Pos Perlindungan Anak Terpadu di beberapa kelurahan sebagai pusat layanan konseling, edukasi pengasuhan, dan rujukan kasus kekerasan terhadap anak.

Di tingkat kelurahan, berbagai inovasi lokal turut memperkuat penyelenggaraan KLA. Kelurahan Paal Lima, misalnya, telah membangun taman bermain inklusif yang dapat diakses oleh anak-anak dengan disabilitas, serta menyelenggarakan pelatihan pengasuhan positif bagi orang tua dan wali anak. Kelurahan Simpang III Sipin mengembangkan program “Sahabat Anak Kelurahan” yang melibatkan remaja sebagai agen perubahan dalam mencegah pernikahan anak dan kekerasan berbasis gender. Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas mampu menghasilkan dampak nyata dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Untuk mendukung keberlanjutan program, Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak secara rutin memberikan pelatihan teknis, fasilitasi koordinasi, serta pendampingan kepada Gugus Tugas KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan. Sistem pelaporan berbasis digital mulai diterapkan untuk memudahkan dokumentasi kegiatan, pemantauan capaian, serta integrasi data dengan sistem nasional. Selain itu, pemerintah juga mendorong pengalokasian anggaran khusus untuk kegiatan KLA di tingkat lokal melalui mekanisme Musrenbang dan Dana Kelurahan.

Namun demikian, tantangan masih dihadapi dalam pelaksanaan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan. Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam tentang hak anak, belum meratanya partisipasi masyarakat, serta minimnya dukungan anggaran di beberapa wilayah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Jambi terus melakukan advokasi dan penguatan kapasitas agar seluruh wilayah memiliki standar minimum pelayanan anak yang terpenuhi.

Ke depan, Pemerintah Kota Jambi menargetkan seluruh kecamatan dan kelurahan dapat menjadi wilayah ramah anak yang memenuhi indikator dasar KLA, seperti tersedianya ruang bermain aman, layanan kesehatan anak, pendidikan inklusif, serta mekanisme pelaporan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis komunitas, Kota Jambi optimis dapat mewujudkan lingkungan yang mendukung anak untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan daerah.

Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak, penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan juga mulai menunjukkan pergeseran paradigma. Tidak lagi sekadar menjalankan program yang bersifat seremonial, tetapi mulai mengarah pada pendekatan berbasis kebutuhan nyata anak di wilayah masing-masing. Beberapa kelurahan bahkan telah mengintegrasikan prinsip KLA ke dalam perencanaan pembangunan lokal, seperti pengadaan fasilitas sanitasi yang ramah anak, penyediaan layanan kesehatan reproduksi remaja, serta pelibatan anak dalam forum musyawarah kelurahan. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan KLA bukan hanya tanggung jawab

pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari gerakan sosial yang melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan Kota Jambi yang benar-benar layak bagi anak.

A. PENYELENGGARAAN KLA DI KECAMATAN

Pembangunan Kota Jambi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga pada penciptaan lingkungan sosial yang sehat, inklusif, dan berkeadilan. Dalam kerangka besar Program Kota Jambi Bahagia, Pemerintah Kota Jambi menempatkan kebahagiaan warga sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan. Salah satu pilar penting dalam mewujudkan kebahagiaan tersebut adalah pemenuhan hak anak secara menyeluruh melalui penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang terintegrasi hingga ke tingkat kecamatan.

Kecamatan sebagai unit pemerintahan yang berada di antara kota dan kelurahan memiliki posisi strategis dalam memastikan bahwa kebijakan dan program ramah anak benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat di akar rumput. Penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan bukan sekadar pelimpahan tugas administratif, melainkan transformasi paradigma pembangunan yang berpusat pada anak sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek perlindungan.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Jambi telah mendorong pembentukan Gugus Tugas KLA Kecamatan yang terdiri dari unsur pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, tenaga kesehatan, pendidik, kader PKK, serta perwakilan Forum Anak Kecamatan. Gugus Tugas ini berfungsi sebagai motor penggerak dalam pelaksanaan program ramah

anak, mulai dari identifikasi isu lokal, penyusunan rencana aksi, pelaksanaan kegiatan edukatif, hingga pemantauan dan evaluasi program. Dengan pendekatan ini, kecamatan menjadi simpul koordinasi yang efektif antara kebijakan kota dan kebutuhan masyarakat setempat. Integrasi antara KLA dan Program Kota Jambi Bahagia terlihat nyata dalam berbagai inisiatif di lapangan. Misalnya:

- a. Kecamatan Jambi Selatan telah melaksanakan pelatihan pengasuhan positif berbasis hak anak bagi orang tua dan wali murid, sejalan dengan pilar kebahagiaan keluarga dalam program Kota Jambi Bahagia. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas pengasuhan, tetapi juga memperkuat ikatan emosional antara anak dan orang tua sebagai fondasi kebahagiaan rumah tangga.
- b. Kecamatan Danau Sipin mengembangkan program “Kecamatan Ramah Anak” yang mencakup penyediaan ruang bermain terbuka, layanan konseling remaja, dan pelibatan anak dalam kegiatan Musrenbang Kecamatan. Program ini mendukung aspek kebahagiaan lingkungan dan kesehatan mental anak, serta memperkuat partisipasi anak dalam proses pembangunan.
- c. Kecamatan Kota Baru telah menginisiasi kegiatan edukasi pencegahan kekerasan seksual dan pernikahan anak melalui kerja sama dengan sekolah dan lembaga keagamaan setempat. Upaya ini menciptakan rasa aman dan nyaman bagi anak-anak, yang merupakan prasyarat penting dalam menciptakan kebahagiaan sosial.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi secara konsisten memberikan pendampingan teknis kepada

Gugus Tugas KLA di tingkat kecamatan. Pendampingan ini mencakup pelatihan manajemen program, fasilitasi koordinasi lintas sektor, serta penyediaan materi edukasi dan alat bantu kampanye. Selain itu, sistem pelaporan berbasis digital mulai diterapkan untuk memudahkan dokumentasi kegiatan dan pemantauan capaian indikator KLA di tingkat kecamatan, sehingga proses evaluasi menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Namun, penyelenggaraan KLA di kecamatan tidak lepas dari tantangan. Beberapa kecamatan masih menghadapi keterbatasan anggaran operasional, minimnya tenaga pendamping yang memiliki kompetensi khusus di bidang perlindungan anak, serta belum meratanya pemahaman tentang konsep KLA di kalangan aparatur dan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Jambi terus melakukan advokasi, penguatan kapasitas, dan penyebarluasan informasi agar seluruh kecamatan mampu menjalankan fungsi perlindungan anak secara optimal dan berkelanjutan.

Ke depan, penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari kewajiban birokrasi, tetapi juga menjadi gerakan sosial yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang layak dan membahagiakan bagi anak. Dengan pendekatan yang partisipatif, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan lokal, Kota Jambi optimis dapat memperkuat fondasi KLA dari tingkat kecamatan sebagai pilar utama dalam mewujudkan Kota Jambi Bahagia—sebuah kota yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga hangat secara sosial dan emosional.

Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang akan menjadi generasi yang tangguh, kreatif, dan berdaya saing. Mereka bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi

juga aktor utama dalam mewujudkan masa depan Kota Jambi yang lebih cerah. Maka, penyelenggaraan KLA di kecamatan bukan sekadar program, melainkan investasi jangka panjang dalam kebahagiaan dan keberlanjutan kota.

Sebagai bagian dari penguatan kelembagaan dan keberlanjutan program, Pemerintah Kota Jambi juga mendorong inovasi lokal di tingkat kecamatan yang selaras dengan semangat Kota Jambi Bahagia. Inovasi ini mencakup pengembangan sistem informasi anak berbasis komunitas, pelibatan anak dalam forum-forum dialog publik, serta penyelenggaraan kegiatan budaya dan olahraga yang inklusif bagi anak-anak dari berbagai latar belakang sosial. Dengan memberikan ruang bagi anak untuk berpartisipasi aktif dan mengekspresikan diri, kecamatan tidak hanya menjadi pusat layanan, tetapi juga menjadi ruang tumbuh yang menyenangkan dan membahagiakan. Inisiatif-inisiatif ini memperkuat pesan bahwa kebahagiaan anak bukanlah hasil akhir, melainkan proses yang harus dibangun bersama secara konsisten dan penuh komitmen oleh seluruh elemen masyarakat.

Tabel 9.1

Data Kecamatan Layak Anak Kota Jambi Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Dokumen		
		SK Forum Anak	SK PATBM	Kelompok Olahraga dan Kesenian
1.	Telanaipura	√	√	√
2.	Jambi Selatan	√	√	√
3.	Jambi Timur	√	√	√

4.	Pasar Jambi	√	√	√
5.	Pelayangan	√	√	√
6.	Danau Teluk	√	√	√
7.	Kota Baru	√	√	√
8.	Jelutung	√	√	√
9.	Alam Barajo	√	√	√
10.	Paal Merah	√	√	√
11.	Danau Sipin	√	√	√

Sumber : DPMPPA Kota Jambi, 2025

B. PENYELENGGARAAN KLA DI KELURAHAN

Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) di tingkat kelurahan merupakan elemen krusial dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip perlindungan dan pemenuhan hak anak benar-benar diterapkan secara nyata di lingkungan terdekat anak. Kelurahan sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan kebijakan KLA ke dalam kehidupan sehari-hari warga. Di Kota Jambi, pendekatan berbasis kelurahan telah menjadi fondasi penting dalam memperluas jangkauan program KLA secara inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Sepanjang tahun 2025, seluruh kelurahan di Kota Jambi telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung pelaksanaan KLA. Hal ini tercermin dari terbentuknya Kelompok Kerja KLA Kelurahan di setiap wilayah, yang terdiri dari unsur perangkat kelurahan, kader PKK, tokoh masyarakat, Forum Anak, serta perwakilan dari lembaga pendidikan dan kesehatan. Kelompok kerja ini tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana

teknis, tetapi juga sebagai penggerak perubahan sosial yang mendorong terciptanya lingkungan yang ramah anak.

Berbagai inisiatif lokal telah dikembangkan untuk menjawab kebutuhan spesifik anak di masing-masing kelurahan. Di Kelurahan Talang Banjar, misalnya, program Posyandu Ramah Anak menjadi inovasi unggulan yang menggabungkan layanan kesehatan ibu dan anak dengan edukasi tentang hak anak, pencegahan kekerasan, dan penguatan peran keluarga. Kegiatan ini tidak hanya melibatkan tenaga kesehatan, tetapi juga kader-kader perempuan dan remaja yang telah dilatih sebagai fasilitator komunitas.

Sementara itu, Kelurahan Paal Lima mengembangkan Pojok Literasi Anak, sebuah ruang terbuka yang menyediakan buku-buku bacaan, permainan edukatif, dan kegiatan kreatif seperti menggambar, menulis cerita, dan diskusi kelompok. Pojok ini menjadi tempat yang aman dan menyenangkan bagi anak-anak untuk belajar dan berekspresi, sekaligus menjadi wadah bagi Forum Anak setempat untuk menyuarakan aspirasi mereka.

Di Kelurahan Legok, pendekatan berbasis budaya lokal digunakan untuk memperkuat nilai-nilai perlindungan anak. Kegiatan seperti “Jumat Ceria” dan “Ngaji Hak Anak” dilaksanakan secara rutin, menggabungkan unsur keagamaan, edukasi, dan rekreasi dalam satu rangkaian kegiatan yang melibatkan anak, orang tua, dan tokoh masyarakat. Kelurahan ini juga aktif dalam kampanye Kampung Bebas Kekerasan, yang bertujuan membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak.

Pemerintah Kota Jambi memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan KLA di kelurahan melalui pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi kegiatan. Aparatur kelurahan dibekali dengan pemahaman tentang indikator KLA, teknik pelaporan, serta pendekatan berbasis hak anak. Selain itu, sistem pelaporan kegiatan mulai diarahkan ke platform digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi data.

Penyelenggaraan KLA di kelurahan juga mendorong partisipasi aktif anak dalam proses pembangunan. Forum Anak di tingkat kelurahan diberi ruang untuk terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), menyampaikan aspirasi, serta ikut dalam monitoring kegiatan yang berdampak pada kehidupan mereka. Hal ini menjadi bukti bahwa anak tidak hanya dipandang sebagai objek perlindungan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk didengar dan dilibatkan.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan KLA di kelurahan telah membawa perubahan positif dalam cara masyarakat memandang dan memperlakukan anak. Dari yang semula bersifat sporadis dan sektoral, kini menjadi gerakan kolektif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kelurahan di Kota Jambi telah berkembang menjadi ruang yang semakin ramah, aman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dengan semangat gotong royong dan kepemimpinan lokal yang progresif, Kota Jambi terus memperkuat fondasi KLA dari akar rumput, menuju masa depan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh anak.

Tabel 9.2

Data Kelurahan Layak Anak Di Kota Jambi tahun 2025

No	Indikator	Jumlah	
		Sudah	Belum
1.	Kelurahan yang memiliki peraturan desa/ kebijakan kelurahan tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak	68	-
2.	Kelurahan yang memiliki Forum Anak Kelurahan	68	-
3.	kelurahan yang melaksanakan fungsi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	68	-
4.	Kelurahan memiliki kelompok olahraga/ kesenian anak/minat bakat anak lainnya	68	-
5.	Kelurahan yang memiliki tempat bermain anak	68	-
6.	Kelurahan yang memiliki profil desa/kelurahan yang memuat data pilah tentang anak menurut jenis kelamin, umur dan berisi indikator desa/ kelurahan layak anak	68	-
7.	kelurahan yang memiliki yang memiliki layanan PAUD- HI (Pendidikan Anak Usia Dini-Holistik Integratif)	68	-

Sumber : DPMPPA Kota Jambi, 2025

BAB X

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyusunan Profil Kota Layak Anak (KLA) Kota Jambi Tahun 2025 merupakan cerminan komitmen dan kerja kolektif seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan berpihak kepada anak. Sepanjang tahun ini, berbagai kebijakan, program, dan inovasi telah dilaksanakan secara terstruktur dan berkesinambungan, mulai dari tingkat kota hingga ke kecamatan dan kelurahan. Capaian tertinggi berupa predikat “Utama” dalam Anugerah KLA 2025 bukanlah sekadar penghargaan simbolik, melainkan bukti nyata bahwa Kota Jambi telah menempatkan anak sebagai pusat pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Jambi, di bawah kepemimpinan Wali Kota dr. Maulana, telah menunjukkan arah kebijakan yang progresif dan berpihak kepada anak. Penguatan regulasi, sinergi lintas sektor, serta pelibatan aktif masyarakat dan anak-anak sendiri menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan KLA. Inovasi lokal seperti Forum Anak Bumi Angso Duo, Pita Molin, Posyandu Ramah Anak, dan Pojok Literasi Anak telah membuktikan bahwa pendekatan berbasis komunitas mampu menjawab tantangan nyata di lapangan.

Penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan menjadi kekuatan utama dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip perlindungan anak tidak hanya berhenti di tataran kebijakan, tetapi benar-benar hadir dalam

kehidupan sehari-hari warga. Partisipasi aktif dari perangkat daerah, tokoh masyarakat, kader, dan anak-anak sendiri telah menciptakan ekosistem sosial yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Namun demikian, Kota Jambi menyadari bahwa tantangan dalam pemenuhan hak anak bersifat dinamis dan kompleks. Oleh karena itu, evaluasi berkala, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan sistem pelaporan dan pemantauan akan terus menjadi prioritas dalam pengembangan KLA ke depan. Pemerintah juga berkomitmen untuk memperluas ruang partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa setiap anak—tanpa terkecuali—memiliki akses terhadap layanan dasar, perlindungan, dan ruang untuk berkembang sesuai potensinya.

Dengan semangat kolaborasi lintas sektor, dan kepemimpinan yang visioner, Kota Jambi siap melangkah lebih jauh dalam mewujudkan kota yang benar-benar layak bagi anak. Profil ini bukanlah akhir dari sebuah perjalanan, melainkan pijakan awal menuju masa depan yang lebih adil, aman, dan penuh harapan bagi generasi penerus bangsa.

B. SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Jambi sepanjang tahun 2025, terdapat sejumlah rekomendasi strategis yang dapat dijadikan acuan untuk memperkuat dan menyempurnakan pelaksanaan program di masa mendatang. Meskipun capaian yang diraih telah menunjukkan kemajuan signifikan, tantangan dalam pemenuhan hak

anak tetap memerlukan perhatian serius dan pendekatan yang adaptif terhadap dinamika sosial, budaya, dan teknologi.

Pertama, perlu dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia di seluruh tingkatan pelaksana KLA, mulai dari perangkat daerah hingga kader di kelurahan. Pelatihan yang berkelanjutan, berbasis kebutuhan lokal, dan didukung oleh modul yang relevan akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program serta memperkuat pemahaman terhadap prinsip-prinsip hak anak.

Kedua, disarankan agar Pemerintah Kota Jambi memperluas ruang partisipasi anak dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Forum Anak yang telah terbentuk di berbagai wilayah perlu difasilitasi secara lebih aktif agar mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan anak. Partisipasi anak bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai bentuk pengakuan terhadap kapasitas mereka sebagai agen perubahan.

Ketiga, perlu dilakukan penguatan sistem pemantauan dan pelaporan berbasis teknologi digital. Dengan memanfaatkan platform daring, pelaksanaan KLA dapat terdokumentasi secara lebih akurat, transparan, dan mudah diakses oleh publik. Hal ini juga akan mempermudah koordinasi antarwilayah serta mempercepat respons terhadap isu-isu yang muncul di lapangan.

Keempat, disarankan agar pendekatan KLA lebih terintegrasi dengan program pembangunan lainnya, seperti penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan layanan kesehatan. Sinergi

lintas sektor akan memastikan bahwa hak anak tidak terfragmentasi, melainkan menjadi bagian utuh dari pembangunan berkelanjutan.

Kelima, perlu adanya penguatan regulasi dan kebijakan daerah yang berpihak pada anak, termasuk revisi terhadap peraturan yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan anak. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat mendorong lahirnya inovasi kebijakan yang berbasis data dan praktik baik dari kelurahan serta kecamatan.

Terakhir, disarankan agar Pemerintah Kota Jambi terus menjalin kemitraan dengan dunia usaha, media, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam mendukung pelaksanaan KLA. Kolaborasi multisektor akan memperluas cakupan program, memperkuat sumber daya, dan menciptakan ekosistem sosial yang lebih kondusif bagi tumbuh kembang anak.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut secara konsisten dan berkelanjutan, Kota Jambi diharapkan tidak hanya mempertahankan predikat “Utama” dalam Anugerah KLA, tetapi juga menjadi model inspiratif bagi daerah lain dalam mewujudkan kota yang benar-benar layak bagi anak tempat di mana setiap anak merasa aman, dihargai, dan memiliki ruang untuk berkembang sesuai potensinya.